

**KONSEP PEMERINTAHAN MENURUT BAKRI SYAHID
(STUDI ATAS TAFSIR AL-HUDA TAFSIR QUR'AN BASA JAWI)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Ilmu Ushuluddin (S.Ag)
Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Khusnul Arifah Ma'sum

NIM 12.11.12.005

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA
2017 M. / 1438 H.**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Arifah Ma'sum
NIM : 121112005
Tempat/Tgl Lahir : Karanganyar, 05 Maret 1992
Alamat : Ds. Tegan, Rt: 02/ Rw: 03, Dsa. Kadipiro, Kec.
Jumapolo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **KONSEP PEMERINTAHAN MENURUT BAKRI SYAHID (Studi Atas Tafsir *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*)** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Selain itu, apabila di dalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat gelar kesarjanaan saya dibatalkan, maka saya siap menanggung risikonya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta, 7 Februari 2017 M



Khusnul Arifah Ma'sum
NIM. 121112005

Dr. Islah Gusmian, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Khusnul Arifah Ma'sum

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Surakarta

Assalamau'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan bahwa setelah membaca, menelaah, membimbing dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami mengambil keputusan bahwa skripsi saudara **Khusnul Arifah Ma'sum** dengan nomor Induk Mahasiswa 12.11.12.005 yang berjudul:

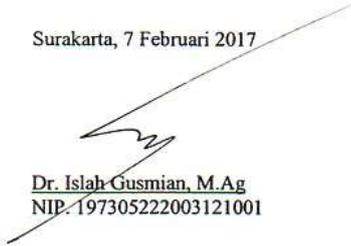
KONSEP PEMERINTAHAN MENURUT BAKRI SYAHID (Studi Atas Tafsir Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam dalam ilmu Ushuluddin. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar skripsi di atas dapat dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas perhatian dan diperkenankannya, kami ucapkan terima kasih.

Wasalmu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 7 Februari 2017


Dr. Islah Gusmian, M.Ag
NIP. 197305222003121001

Hj. Ari Hikmawati, S.Ag, M.Pd
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Khusnul Arifah Ma'sum

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Surakarta

Assalamau'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan bahwa setelah membaca, menelaah, membimbing dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami mengambil keputusan bahwa skripsi saudari **Khusnul Arifah Ma'sum** dengan nomor Induk Mahasiswa 12.11.12.005 yang berjudul:

KONSEP PEMERINTAHAN MENURUT BAKRI SYAHID (Studi Atas Tafsir Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam dalam ilmu Ushuluddin. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar skripsi di atas dapat dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas perhatian dan diperkenankannya, kami ucapkan terima kasih.

Wasalmu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 7 Februari 2017



Hj. Ari Hikmawati, S.Ag, M.Pd
NIP. 197202292000032001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KONSEP PEMERINTAHAN MENEURUT BAKRI SYAHID (Studi Atas Tafsir *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*)** atas nama **Khusnul Arifah Ma'sum** dengan nomor Induk Mahasiswa 12.11.12.005 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji skripsi Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, pada tanggal 17 Februari 2017, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam dalam ilmu Ushuluddin.

Surakarta, 17 Februari 2017

PANITIA UJIAN MUNAQSAH

Ketua Sidang

Hj. Ari Hikmawati, S.Ag. M.Pd
NIP. 197202292000032001

Penguji I

Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, MA, M. Ed
NIP. 197411092008011011

Penguji II

H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I
NIP. 197106262003121002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah



Dr. Imam Mujahid, S.Ag. M.Pd. *bu*
NIP. 19740509 200003 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin.

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	`
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

2. Vokal Panjang (*Madd*)

Suku kata dalam bahasa Arab yang dibaca panjang (*madd*), transliterasinya berupa pembubuhan garis lengkung di atas huruf hidup yang dibaca panjang.

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	قَالَ	Qâla
2	يَقُولُ	Yaqûlu
3	قِيلَ	Qîla

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf al (ال), dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf Syamsiyyah maupun huruf qamariyyah.

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	الحكيم	Al-Hakîm
2	الرحمن	Al-Rahman

4. *Syaddah*

Syaddah dalam dialih aksarakan dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	مُتَعَدِّدَةً	Muta`addidah
2	عِدَّةً	`Iddah

5. *Ta' Marbûthah*

Apabila *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi /h/. Hal yang sama juga berlaku bila *ta marbûthah* tersebut diikuti kata sifat (*na't*). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut dialih aksarakan menjadi /t/.

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmi`ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdat al-Wujûd

6. Daftar Singkatan

cet. : cetakan

H. : hijriyah

h. : halaman

HR. : hadis riwayat

J. : juz atau jilid

M. : masehi

QS. : qur'an surat

Sda : sama dengan atas

terj. : terjemahan

t.tp : tanpa tempat (kota, negeri)

t.np : tanpa nama penerbit

t.th : tanpa tahun

w. : wafat

Swt. : *Subhânahu wa ta`alâ*

Saw. : *Shallallahu `alaihi wasallam*

Vol./V. : volume

ABSTRAK

KHUSNUL ARIFAH MA'SUM, Konsep Pemerintahan Menurut Bakri Syahid (Studi atas Tafsir *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*). Bakri Syahid adalah salah seorang mufasir Indonesia yang menghasilkan karya tafsir al-Qur'an dalam bentuk tafsir al-Quran berbahasa daerah (Jawa) dengan aksara latin. Bakri Syahid memiliki latar belakang berbeda dengan para mufasi-mufasir lainnya yaitu sebagai seorang militer. Pandangan Bakri Syahid terhadap pemerintahan serta sikap dia sebagai seorang militerpun ikut mewarnai dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Pemerintahan merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu kehidupan dalam berbangsa dan bermegara, demi tercapainya kesejahteraan dunia maupun akhirat, baik dalam material maupun sepiritual. Untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik dan benar dan untuk tercipta kesejahteraan maka perlu adanya konsep untuk membangun sebuah keharmonisan dalam suatu pemerintahan. Konsep pemerintahan Bakri Syahid ini lah yang perlu dimunculkan sebagai usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan beradab serta menanamkan nilai-nilai pancasila yang menjadi asas negara Indonesia. Penelitian ini menjawab dua masalah yaitu; bagaimana penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerintahan dan bagaimana konsep pemerintahan Menurut Bakri Syahid dalam tafsir *Al-Huda*?

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Sumber primernya diambil dari tafsir al-Qur'an *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*. Sementara itu, sumber sekundernya diambil dari berbagai kitab, buku, jurnal, dan makalah ilmiah yang membahas masalah pemerintahan yang relevan dengan masalah penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskripsi dimana peneliti menguraikan secara teratur konsepsi pemikiran dari tokoh yang penulis teliti, termasuk di dalamnya adalah biografi dari tokoh tersebut dan teori tafsir sastra terhadap al-Qur'an (*al-tafsîr al-adabî li al-Qur'an*) sebagai pisau analisisnya yang digagas oleh Amîn al-khûlî.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, ada lima pokok yang menjadi konsep pemerintahan menurut Bakri syahid dalam tafsir *Al-Huda* konsep-konsep tersebut adalah: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Sedangkan dalam menafsirkan ayat-ayat pemerintahan Bakri Syahid sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dan profesi yang ia jalani, serta pengaruh dari latar belakang kehidupan sosiaal dan budaya pada masa nya.

MOTTO

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

“Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, adalah dari Tuhan semesta alam.”

(QS. As-Sajadah; 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kehadiran Allah swt. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku tanpa kenal lelah dan menyerah, semoga beliau diberi kesehatan, kekuatan dan umur panjang, amin.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang Nurul Umi Ma'sum dan Farhan yang selalu mendo'akan dan terus menyemangatiku.
- ❖ Adik-adikku tercinta Gus Miknaja, Abdullah Syafi'i, dan Fitri Musyarofah yang karena ocehan cerewet mereka membuat semangat tersendiri dalam diri ini.
- ❖ Untuk teman terdekatku trimakasih atas motivasi, inspirasi dan do'anya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, dengan taufiq, hidayah dan Rahmah-Nya kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan berusaha menjahui segala larangan-Nya. Shalawat serta salam kami limpahkan kepada Rasulullah saw yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam terang benerang.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta atas izin-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun demikian, skripsi ini tidak akan terselesaikan, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan selesainya skripsi ini, rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Mudofir, S.Ag, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Bapak Dr. Imam Mujahid, S.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I, selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, beserta jajaran pimpinan.
4. Ibu Hj. Ari Hikmawati, S.Ag, M.Pd, selaku wali studi sekaligus pembimbing II, terima kasih atas motivasi dan segala ilmu yang pernah diajarkan selama ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis, bangsa dan agama. terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis, meskipun dalam keadaan sibuk beliau tetap memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Islah Gusmian, M.Ag, selaku pembimbing I dengan kesabaran dan ketelitiannya terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Panitia ujian munaqasah, Ibu Hj. Ari Hikmawati, S.Ag, M.Pd sebagai ketua sidang, Dr. H. Moh Abdul Kholiq Hasan, MA, M. Ed sebagai penguji I, dan H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I sebagai penguji II, yang telah memberikan kritikan, masukan dan solusi untuk skripsi yang penulis bahas ini.
7. Seluruh dosen IAIN Surakarta terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
8. Staf Perpustakaan IAIN Surakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

9. Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Ayahanda Paiman dan Ibunda Sukini tercinta yang tidak pernah lelah dalam mendoakan, mendidik putra-putrinya, serta memberi dukungan moral dan spirit dari waktu ke waktu dan memberikan pelajaran berharga bagaimana menerima dan memaknai hidup ini.
11. Kakakku Mba. Nurul Umi Ma'sum dan Mas.Farhan yang terus memotivasi dan mendo'akan adik tercintanya ini.
12. Kepada keluarga Racana RMS-NAS IAIN Surakarta yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran dan dukungan selama berada di IAIN Surakarta, khususnya angkatan R-17 , Iffah, Kikiy, Naim, Erma, Nasihan, Pakde. Aqdam, Mbh.Randy, Harno, dan yang lainnya terima kasih atas dukungan, do'a dan motivasinya.
13. Sahabat-sahabat kos Virza; The-we, Eka, mb.Vita, Aurel, Uci, Rahma, Puput, Vina dan yang lainnya, terimakasih atas semua dukungan dan ocehan kalian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Sahabat-sahabat angkatanku TH 2012 Kikib, Aloy, Huda, Rofiq, Acil, Ipin, Shopenk, Ipenk, Nur Choliz, Ali, terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 7 Februari 2017

Khusnul Arifah Ma'sum
NIM. 12.11.12.005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II MENGENAL BAKRI SYAHID DAN TAFSIR <i>AL-HUDA</i>	20
A. Biografi Bakri Syahid.....	20
1. Pendidikan Bakri Syahid.....	22
2. Peran Sosial dan Politik Bakri Syahid.....	23
3. Pengaruh latar belakang militer terhadap keluarga.....	24
4. Karya-karya.....	25

B.	Tafsir <i>Al-Huda</i>	26
1.	Sejarah penafsiran tafsir <i>Al-Huda</i>	26
2.	Percetakan tafsir <i>Al-Huda</i>	27
3.	Metode penulisan tafsir <i>Al-Huda</i>	28
4.	Metode penafsiran tafsir <i>Al-Huda</i>	35
5.	Corak tafsir <i>Al-Huda</i>	37
6.	Kelebihann dan kekurangan tafsir <i>Al-Huda</i>	39
BAB III	PENGERTIAN PEMERINTAHAN	41
A.	Makna Pemerintahan.....	41
B.	Sistem Pemerintahan.....	43
1.	Parlementer.....	43
2.	Presidentil.....	43
3.	Referendum.....	43
4.	Bentuk Pemerintahan.....	47
1.	Aristokrasi.....	48
2.	Timokrasi.....	48
3.	Oligarchi.....	48
4.	Demokrasi.....	48
5.	Tirani.....	48
6.	Monarchi.....	48
7.	Republik.....	49
5.	Nilai-nilai dasar Pemerintahan dalam Islam.....	50
1.	Beriman.....	50
2.	Keadilan.....	53
3.	Musyawahah.....	54
4.	Persatuan.....	55
5.	Amanah.....	56
6.	Tujuan Pemerintahan.....	58

BAB IV	KONSEP PEMERINTAHAN BAKRI SYAHID	60
	A. Ayat-ayat pemerintahan dalam tafsir <i>Al-Huda</i>	60
	B. Penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat pemerintahan dalam tafsir <i>Al-Huda</i>	63
	C. Konsep pemerintahan Bakri Syahid dalam tafsir <i>Al-Huda</i>	73
	1. Ketuhanan.....	73
	2. Kemanusiaan.....	74
	3. Persatuan.....	76
	4. Musyawarah.....	77
	5. Keadilan.....	78
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran-saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	83
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab yang lengkap dan sempurna. Tidak ada satu aspekpun dalam kehidupan manusia yang tidak dibicarakan di dalam al-Qur'an. Allah SWT dalam Q.S al-An'am (6): 38 berfirman:

... مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ...

“...Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab ...”¹

Sebagian mufasirin menafsirkan al-Kitab itu dengan *Lauhul mahfudz* dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam *Lauhul mahfudz*. Dan ada pula yang menafsirkan al-Qur'an dengan arti: dalam al-Qur'an itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum serta hikmah-hikmah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat termasuk juga dalam masalah hal pemerintahan.²

Pemerintah merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat, ia juga menempati posisi tertinggi dalam tatanan Negara. Dalam kehidupan pemerintah ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh, ia memiliki peranan yang strategis dalam mengatur pola dan gerakan, kecakapannya dalam

¹ Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 133.

² Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 1.

memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat.³

kepemimpinan manusia di dunia ini merupakan amanat Allah yang diembankan kepada manusia yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila dilaksanakan dengan maksimal maka Allah akan memberikan kebaikan dan pahala kepada orang yang melaksanakan amanat tersebut dan apabila amanat tersebut disia-siakan dan tidak dilaksanakan dengan baik maka orang tersebut berdosa dan bahkan akan dicabut nikmat itu darinya. Sebagaimana firman Allah:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قَدِيرٌ

“Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁴

Allah juga menerangkan dalam al-Qur'an pada akhir surat al-Baqarah ayat 247, yang berbunyi:

³ Maszofi, *Konsep Pemimpin Islam dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-'Uyun Karya Abu Hasan Bin 'Ali bin Muhammad Al-Mawardi*, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014), h. 1.

⁴Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Mushaf Al-Quran, *al-Qur'an dan Terjema*, h.54.

... وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مِمَّنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“...Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.

Kedua ayat ini menerangkan bahwa, Allah memberikan kekuasaan atau kerajaan kepada orang yang dikehendaki dan Allah juga mencabut kekuasaan atau kerajaan dari orang yang dikehendaki. Dari kedua ayat ini kita mengetahui bahwa Allah maha kuasa untuk mengatur segala sesuatu.

Pemerintahan merupakan salah satu hal yang sangat berat dan rumit, yang tidak semua orang mampu untuk memikulnya terutama dalam hal kepemimpinan umat, disini pemimpin harus mempunyai kecakapan dalam mengatur dan mengatasi berbagai masalah yang kompleks. Al-Qur’an sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan yang menjanjikan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat telah memberikan konsep-konsep pemerintahan bagi umat manusia meskipun di dalam ayat al-Qur’an tidak disebutkan secara eksplisit pembahasan tentang pemerintahan. Dalam al-Qur’an pemerintahan diungkapkan dengan istilah: *Khalifah* dan *Uli al-Amri*.⁵

Istilah pertama, *Khalîfah*. Kata *Khalîfah* berasal dari kata *Khalf* yang berarti “di belakang”. Dari kata *Khalf* terbentuk kata yang lain, seperti kata *Khalîfah* (pengganti), *Khîlaf* (lupa atau keliru) dan *Khalafa* (mengganti). Kata

⁵M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), jld. II, h. 451.

Khalf dan kata turunannya di dalam al-Qur'an disebut 127 kali,⁶ sedangkan kata *khalifah* sendiri disebut dua kali, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Shâd [38]: 26.

Konsep *khalifah* ini dimulai sejak Nabi Adam secara personil yaitu memimpin dirinya sendiri dan hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya dalam hal memimpin umat tetapi juga mencakup memimpin dirinya sendiri yakni mengarahkan dirinya ke arah kebaikan. Disamping memimpin diri sendiri, konsep *khalifah* juga bertugas menyerukan dan menyuruh orang lain berbuat amal makruf dan melarang atau menyerukan orang lain meninggalkan perbuatan mungkar.⁷

Berikutnya Al-Qur'an memberikan gambaran mengenai pemerintahan dengan menyebutnya "*Ulil-Amri*" (أُولِي الْأَمْرِ) Kata ini dipakai dalam al-Qur'an sebanyak dua kali yaitu pada QS. An-Nisâ' [4]: 58 dan 83, yang berhubungan dengan perintah untuk mentaati Allah, mentaati rasul dan para pemimpin.⁸ Kata *Ulil-amri* secara bahasa berasal dari dua suku kata *Uli* (أُولِي) yang berarti "pemilik", dan kata *al-amr* (الْأَمْر) yang berarti "perintah, urusan, perkara"⁹, jadi *Ulil-amri* berarti orang yang ber hak untuk memberi perintah, orang yang memiliki urusan, perkara atau bisa disebut orang yang

⁶*Ibid*, h. 452.

⁷ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta, Gajah Mada Unuversiuaty Press, 2001, h. 17.

⁸ Sebagaimana yang tercantum dalam surat An Nisa' ayat: 59.

⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.38.

menguasai kemaslahatan orang banyak, karena barang siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur suatu urusan untuk mengendalikan keadaan.¹⁰

Pemerintah sangatlah penting adanya di dalam kehidupan kita karena untuk melaksanakan hukum-hukum dan aturan-aturan yang digariskan al-Qur'an dengan disertai jaminan keamanan atau ketenangan dalam melaksanakannya maka perlu adanya suatu sistem yang mengarahkan dan melindungi serta konsekuen dengan aturan-aturan tersebut, yaitu pemerintah dan negara, karena kaum muslimin dalam kehidupannya akan sulit menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah secara individual tanpa interaksi sosial, tanpa sanksi dan tanpa aturan yang kongkrit, maka dari itu dibutuhkan suatu sistem dan pemerintahan untuk mengatur segala urusan mereka dan menunaikan hukum-hukum itu diberbagai tempat.¹¹

Al-Qur'an mengandung hukum-hukum dan petunjuk yang saling berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemerintah seperti firman Allah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

¹⁰M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h.1030.

¹¹ Muhammad al-Mubarak, *Sistim Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Mantiq, Solo, 1995.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS.an-Nisa’ [4]: 58)¹²

Ayat ini turun ditujukan kepada orang-orang yang memegang urusan orang banyak atau yang memegang urusan umat diantaranya *Ulill-amri* (pemegang pemerintahan), bahwasannya Allah menyuruh mereka untuk menunaikan amanat yang diembankan kepada mereka dan untuk berlaku adil apabila mereka mengambil suatu keputusan.

Setelah Allah menyuruh para pemimpin untuk menunaikan amanat yang diembankan kepada mereka dan untuk berlaku adil maka kemudian Allah menyebutkan kewajiban-kewajiban para umat yang dipimpin (rakyat) terhadap pemimpin sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS.An-Nisa’ [4]: 59)

Setelah Allah memerintahkan kepada hambanya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka Allah memerintahkan pula untuk mentaati *Ulil-amri*, yaitu orang-orang yang memegang urusan mereka. Dan apabila ada perselisihan

¹²Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Mushaf Al-Quranal-*Qur'an dan Terjemah*, h.88.

antara pemerintah dengan pemerintah, antara pemerintah dengan rakyat dan antara rakyat dengan rakyat mengenai berbagai macam permasalahan maka al-Qur'an telah mengaturnya di akhir ayat surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

.... فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“.....kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹³

Ayat di atas menjelaskan hubungan baik antara pemimpin yang menjaga amanat dengan orang-orang yang taat kepada Allah, Rasul dan para pemimpin. Sehingga terwujudlah suatu tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menguntungkan, dan apabila terjadi kerusuhan ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi maka jalan yang terbaik adalah kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Islam mengajarkan bahwa seorang pemerintah menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan, dan begitu sebaliknya, jika suatu jama'ah

¹³Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Mushaf Al-Quran, *al-Qur'an dan Terjema*, h.88.

dipimpin oleh orang yang memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran. Olehkarena itu Islam memandang bahwa pemerintahan merupakan posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baladun thayibatûn wa rabbun ghafûr*, yaitu pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem kepemimpinannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakatnya.¹⁴

Seiring perkembangan zaman banyak pula perkembangan teori serta konsep-konsep yang mengupas tentang pemerintahan, seperti contoh konsep dari al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwasannya konsep pemerintahan dalam kitab *al-Ahka as-Sulthoniyyah* terbagi dalam empat bagian: 1) Elit Politik/Pemerintahan, yang terdiri dari khalifah, menteri dan gubernur. 2) *Ahlu al-Aqdi wa al-Hal* (parlemen). 3) Wilayah hukum atau badan kehakiman, ini terbagi dalam tiga bagian yaitu hakim, *mazhalim* dan *muhtasib*. 4) Wilayah Militer. Dan konsep pemerintahan menurut al-Mawardi bersifat distributive. Kekuasaan tunggal

¹⁴Maszofo, *Konsep Pemimpin Islam dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-'Uyun*, h. 2.

berada pada satu orang yaitu khalifah, sementara kekuasaan turunannya terdapat pada menteri, gubernur, panglima militer dan hakim.¹⁵

Selain dari konsep-konsep umum yang seperti penulis contohkan di atas al-Qur'an sendiri pun sudah mengandung konsep-konsep yang berkaitan dengan pemerintahan sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan di awal penulisan latar belakang masalah. maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya, yaitu mengenai konsep pemerintahan dalam al-Qur'an. Lebih lanjut, Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebuah tafsir yaitu, *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, karya (BRIGIEN) Drs. H. Bakri Syahid.¹⁶ Pemilihan ini didasarkan pada segi keilmuan pengarangnya, karena penafsiran dari sebuah tafsir tidak akan pernah jauh dari bidang keilmuan mufasirnya. Bakri Syahid adalah seorang militer yang ahli dalam bidang akademik, politik dan agama pada masanya, yaitu pada era rezim Orde Baru.

Selain daripada itu secara umum Bakri syahid dalam tafsirnya terlihat memberikan dukungan atas sistem pemerintahan yang di bangun pada masa itu, hal ini dapat kita lihat pada penafsirannya terhadap Surah Yunus [10]: 7

.... masyarakat utawi negari ingkang dados idham-idhamipun punika ingkang sosialis religius, inggih punika masyarakat adil makmur ingkang tansah angsal karidhaning Allah. Para sutrisna mugi dadosa kawigatosan politis sosiologis, bilih negara Republik Indonesia punika

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bekasi: Darul Falah, 2012), cet. IV, h. 35-36.

¹⁶Bakri Syahid, "Purwaka", *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi* (Yogyakarta: Bagus Arafah, 1983), h.9.

*negara kesatuan lan negara hukum, serta negara berketuhanan Yang Maha Esa, boten atheis, sanes negari secularis, lan boten negari Islam (ingkang leres negari ingkang masyarakatipun 90% angrungkebi agama Islam).*¹⁷

... masyarakat atau negara yang diidam-idamkan adalah negara yang sosialis religius, yaitu masyarakat yang adil makmur, secara material dan sepirtual, lahir dan batin, serta dunia dan akhirat yang selalu memperoleh ridha Allah. Para sahabat, semoga menjadi perhatian politis sosiologis bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara kesatuan dan negara hukum, serta negara berketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara ateis, bukan negara sekular, dan juga bukan negara Islam (yang benar adalah negara yang masyarakatnya 90% memeluk agama Islam).¹⁸

Penafsirannya yang berhubungan dengan pemerintahan juga terlihat ketika ia menafsirkan surah an-Nisâ' ayat 59:

*“Tiyang ingkang ngasta Pemerintahan punika wajib iman ing Allah, iman dhumateng Rasulullah s.a.w., sarta nindakaken sadaya tatanan lan aturan agami Islam, manawi boten, tangeh lamun badhe saget damel adil-makmur materiil lan sepirtuil, karaharjan Donyan lan Akherat.....”*¹⁹

(“Orang yang memegang pemerintahan itu wajib iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah s.a.w., serta menjalankan semua tatanan dan aturan agama Islam, jika tidak, maka mustahil akan bisa membuat pemerintahan yang adil-makmur dalam material dan sepirtual, serta kesejahteraan Dunia dan Akhirat.....”)

Dari pemaparan ayat di atas dapat kita lihat bagaimana kondisi keilmuan mufasir yang merupakan seorang militer dan latar belakang kehidupan sosial masyarakat pada masa itu sangat mempengaruhi terhadap penafsirannya.

¹⁷Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 364.

¹⁸Islah Gusmian, *Tafsir al-Qur'an Bahasa Jawa, Peneguhan Identitas, Ideologi dan Politik*, <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>, diakses pada 25 November 2016.

¹⁹Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h.147.

Melihat pada uraian yang telah di paparkan diatas maka disini penulis tertarik untuk lebil lanjut mengkaji bagaimanakah sebenarnya penafsiran Bakri Sahid terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerintahan, pada tafsir *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi?* serta bagaimana konsep pemerintahan menurut Bakri Syahid mengingat pada masanya beliau juga merupakan seorang yang berperan penting di dalam pemerintahan?.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerintahan?
2. Bagaimana konsep pemerintahan menurut Bakri Syahid dalam tafsir *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi?*

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerintahan serta untuk mengetahui dan memahami konsep pemerintahan menurut Bakri Syahid dalam tafsir *Al-Huda*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah memberi pengertian kepada masyarakat Islam tentang bagaimana konsep pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam yang disampaikan melalui ayat-ayat al-Qur'an. Di

samping itu, penelitian ini diadakan untuk menambah khazanah keilmuan terutama di bidang Tafsir.

D. Tinjauan Pustaka

Tulisan yang memuat tentang pemerintahan baik dalam bentuk artikel, terjemahan, maupun karya ilmiah dapat dikatakan banyak. Namun dalam tulisan ini penulis ingin menyampaikan focus kajian tentang konsep pemerintahan dalam tafsir *Al-Huda* karya Bakri Syahid.

Dalam skripsi yang berjudul “*Konsep Pemerintahan Menurut Al-Mawardi dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*”. Karya dari saudara Miftahudin Dwi Saputra, mengkaji tentang bagaimana konsep pemerintahan menurut al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthoniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwasannya konsep pemerintahan dalam kitab *al-Ahka as-Sulthoniyyah* terbagi dalam empat bagian: 1) Elit Politik/Pemerintahan, yang terdiri dari khalifah, menteri dan gubernur. 2) *Ahlu al-Aqdi wa al-Hal* (parlemen). 3) Wilayah hukum atau badan kehakiman, ini terbagi dalam tiga bagian yaitu hakim, *mazhalim* dan *muhtasib*. 4) Wilayah Militer. Dan konsep pemerintahan menurut al-Mawardi bersifat distributive. Kekuasaan tunggal berada pada satu orang yaitu khalifah, sementara kekuasaan turunannya terdapat pada menteri, gubernur, panglima militer dan hakim.²⁰

²⁰ Miftahudin Dwi Saputra, “*Konsep Pemerintahan Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Surakarta, 2015), h. 60.

Karya Islah Gusmian yang berjudul “*TAFSIR AL-QUR’AN BAHASA JAWA, Peneguhan Identitas, Ideologi dan Politik*” dalam jurnal *Suhuf*, jurnal kajian al-Qur’an keluaran Kementrian Agama menerangkan bahwasannya dalam arus penulisan tafsir al-Qur’an bahasa Jawa telah terjadi adanya pergulatan kepentingan, kebutuhan, sikap kritis penulis tafsir atas realitas sosial politik. Tafsir al-Qur’an bahasa Jawa ditulis bukan semata-mata demi kepentingan pengajaran yang bersifat religius, tetapi juga terkait dengan sikap penafsir atas masalah sosial, budaya, dan politik. Salah satu karya tafsir yang dicontohkan beliau adalah *Al-huda Tafsir Qur’an Basa jawi* karya Bakri Syahid, beliau menyatakan bahwasannya dalam tafsir tersebut terlihat aspek representasi sikap politik mufasir pada penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang beliau lihat ketika Bakri Syahid menafsirkan surah Yunus [10] ayat 7.²¹

Dalam buku *Al-Qur’an dan Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda* karya Bakri Syahid yang ditulis oleh Dr. Imam Muhsin, mengkaji tentang bagaimana relasi Islam (baca: al-Qur’an) dengan kebudayaan, khususnya membahas bagaimana dialog yang terjadi antara tafsir *al-Huda* dan kebudayaan Jawa. Nilai-nilai budaya Jawa dalam tafsir *al-Huda* berkaitan erat dengan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Hal ini selaras dengan fungsi utama diturunkannya al-Qur’an

²¹Islah Gusmian, *Tafsir al-Qur’an Bahasa Jawa, Peneguhan Identitas, Ideologi dan Politik*, h.161.

sebagai petunjuk bagi manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang realisasinya tidak dapat dilepaskan dari ketiga eksistensi manusia tersebut. Sehubungan dengan itu, nilai-nilai budaya Jawa dalam Tafsir *al-Huda* secara umum kemudian dapat dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu teologis-religius; kepribadian luhur; dan sosial kemasyarakatan.²²

E. Kerangka teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori yang digagas oleh Amîn al-khûlî. Dalam pandangan Amîn al-khûlî, al-Qur'an merupakan bagian dari fakta sosio-kultural. Adapun fakta yang terdapat dalam al-Qur'an terletak pada pemakaian bahasa dan sastranya yang begitu indah. Selain makna eksplisit, ada pula makna implisit yang terkandung didalamnya. Berangkat dari latar belakang itulah kemudian Amîn al-khûlî menggunakan pendekatan sastra dalam menafsirkan al-Qur'an

Berdasarkan uraian diatas, Amîn al-khûlî menyuguhkan dua prinsip metodologis, yaitu :

1. Studi sekitar al-Qur'an (*dirâsah mâ hawl al-Qur'an*)
2. Studi tentang al-Qur'an itu sendiri (*dirâsah fî al-Qur'an nafsih*).²³

Studi yang pertama masih bisa diklasifikasikan lagi menjadi studi hal-hal yang bersifat khusus dan dekat dengan al-Qur'an kemudian studi yang bersifat lebih umum dan jauh dengan al-Qur'an itu sendiri.²⁴

²² Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2013), h. 237.

²³ Amîn al-khûlî, *Manâhij Tajdîd: fî al-nahwi wa al-Balâghah wa al-Adab* (Kairo: Dâr al-Ma'arif, 1961), h. 307.

Adapun yang dimaksud dengan studi yang bersifat khusus dan dekat dengan al-Qur'an adalah segala hal yang wajib diketahui oleh semua orang yang berminat untuk melakukan studi interpretative terhadap al-Qur'an. Misalnya segala hal disekitar kitab suci yang tampak selama sekitar dua puluh tahun masa diturunkannya, ditambah dengan bertahun-tahun periode penulisan, pengumpulan dan penyebaran yang dilaluinya, sampai kepada permasalahan perbedaan cara membacanya, hubungan cara membacanya itu dengan perkembangan bahasa arab, sebagai akibat dari kebangkitan dakwah dan Negara Islam. Studi yang bersifat khusus dan dekat dengan al-Qur'an ini mulai dari masalah turunnya wahyu (asbab al-nuzul), penulisan, pengumpulan, penyebaran dan cara membacanya.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan studi umum terhadap hal-hal yang ada di sekitar al-Qur'an adalah segala yang ada hubungannya dengan lingkungan material dan spiritual yang menjadi wahana munculnya al-Qur'an, tempat kehidupannya, pengumpulannya dan lingkungan tempat al-Qur'an dibaca, dihafalkan, dikhutbahkan yang notabene adalah lingkungan Arab. Oleh karena itu, terasa sangat penting untuk mengetahui secara lengkap dan menyeluruh lingkungan Arab tersebut, baik yang bersifat material seperti tanah, gunung, suhu, padang pasir, iklim, laut, angin, kehidupan biologi dan tumbuhannya, maupun non-material seperti sejarah masa lampau, pemerintahan dalam

²⁴*Ibid.*, h. 308.

²⁵*Ibid.*, h. 308.

berbagai tingkatnya, sistem kepercayaan dengan berbagai macamnya, kesninan dengan berbagai cabangnya, pola profesinya dan sistem etika.²⁶

Sedangkan studi kedua dimulai dengan pembahasan kosakata (*mufradât*) yang ada dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, peneliti harus memperhatikan sejarah perkembangan pengertian setiap kata dan cara pemakaiannya di dalam al-Qur'an.

Jika teori tafsir sastra diaplikasikan dalam penelitian ini, maka pada studi pertama, penulis akan memaparkan latar belakang turunnya ayat-ayat yang membahas pemerintahan (*asbâb al-nuzûl*) termasuk didalamnya konsidi sosial politik masyarakat pada masa dimana tafsir *al-Huda* ditafsirkan serta memaparkan latar belakang penafsiran tafsir *al-Huda*. Kemudian pada studi kedua, penulis akan mengumpulkan setiap ayat yang membicarakan tentang pemerintahan yang ada di dalam tafsir *al-Huda*, beserta korelasi (*munâsabah*) ayat-ayat tersebut didalam masing-masing suratnya dan penafsiran ayat-ayat tersebut.

F. Metode penelitian

Penulis menggunakan beberapa langkah metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk *library reserch* atau kepustakaan dimana semua yang data yang berkaitan dengan penelitian ini akan ditelusuri melalui karya tulis yang telah ada.

²⁶ *Ibid.*, h. 310.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sumber tertulis. Diantaranya adalah kitab, buku, jurnal, dan artikel yang membahas kajian ini. Sumber data literer meliputi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir *al-Huda tafsir Qur'an Basa Jawi* karya Bakri Syahid.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua buku, artikel, jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan:

- a. Melihat penafsiran Bakri Syahid tentang ayat yang mengisyaratkan tentang Konsep Pemerintahan di dalam tafsir *al-Huda*.
- b. Menelaah isi penafsirannya tentang ayat tersebut untuk kemudian menerapkannya sebagai konsep yang ditawarkan Bakri Syahid dalam masalah ini.
- c. Meninjau penafsiran Bakri Syahid tentang ayat-ayat yang terkait dengan konsep tersebut.

4. Analisa Data

Penelitian ini mencakup pemikiran tokoh dalam karya-karyanya, sehingga membutuhkan kejelian dalam menganalisa karya yang mereka tulis khususnya tafsir yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sebuah karya yang ditulis seseorang pasti mempunyai hubungan erat dengan latar belakang pendidikan, lingkungan, dan kondisi sosial yang melingkupinya saat itu.

Untuk itu penulis menggunakan metode deskripsi dimana peneliti menguraikan secara teratur konsepsi pemikiran dari tokoh, termasuk di dalamnya adalah biografi dari tokoh tersebut.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang biografi Bakri Syahid; riwayat hidup, riwayat pendidikan, sosial dan politiknya serta karya-karyanya. Tafsir *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*; Sejarah pentafsiran, Percetakan tafsir *Al-Huda*, metode penulisan tafsir *Al-Huda*, metode penafsiran tafsir *Al-Huda* dan corak tafsir *Al-Huda*.

²⁷ Wardoyo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ushuluddin STAIN Surakarta*, cet-I, (Kartasura: Penerbit Sopia, 2008), h. 16.

Bab tiga, berisi tentang Pengertian Pemerintahan; Makna Pemerintah Islam, Sistem Pemerintahan, Bentuk Pemerintahan, Nilai-nilai pemerintahan dalam Islam, dan Tujuan Pemerintahan.

Bab empat, berisi tentang; Ayat-ayat pemerintahan dalam Tafsir *Al-Huda*, Penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat pemerintahan dalam Tafsir *Al-Huda* dan Konsep pemerintahan menurut Bakri Syahid.

Bab lima, penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka, dan riwayat hidup penulis.

BAB II
MENGENAL BAKRI SYAHID
DAN TAFSIR AL-HUDA

A. Biografi Kolonel (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid

Nama asli Bakri Syahid adalah Bakri, sedangkan tambahan nama Syahid diambil dari nama ayahnya, Muhammad Syahid. Bakri Syahid merupakan sosok pribadi yang memiliki banyak profesi. Bakri Syahid lahir di kampung Suronatan Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta pada hari Senin Wage tanggal 16 Desember 1918 M.²⁸ Ayahnya bernama Muhammad Syahid, berasal dari Kotagede Yogyakarta. Adapun ibunya bernama Dzakirah, berasal dari kampung Suronatan Yogyakarta, di kampung inilah Bakri Syahid menghabiskan masa kecilnya hingga tumbuh besar sampai dewasa. Ia merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara. Pada waktu kecil, Bakri Syahid dikenal sebagai anak yang rajin, cerdas, dan memiliki sikap mandiri. Ia dikenal sebagai seseorang yang pekerja keras dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Di sela-sela waktu sekolahnya ia tidak segan-segan untuk membantu orang tuanya berjualan pisang goreng untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. Selain itu Ia juga masuk menjadi anggota gerilyawan pada saat sekolah di Madrasah Mu'allimin,

²⁸ Bakri Syahid, *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 9.

keaktifannya sebagai anggotagerliyawan itulah yang mengantarkannya menjadi anggota ABRI (sekarang TNI).²⁹

Nurul Asikin perempuan berumur 56 tahun yang merupakan keponakan Bakri Syahid saat diwawancarai oleh Imam Muhsin mengatakan bahwa setelah dewasa Bakri Syahid dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang gadis bernama Siti Isnainiyah. Gadis kelahiran 1925 ini dinikahnya karena mengikuti wasiat dari “sesepeuh”. Dari pernikahannya itu kemudian lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Bagus Arafah. Namun, pada usia 9 bulan anak kesayangannya itu meninggal dunia karena sakit. Untuk mengenang kematian anaknya tersebut, nama anaknya diabadikan sebagai nama perusahaan terbatas bertitel PT.Bagus Arafah. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang, antara lain kontraktor, laboratorium, dan penerbitan. Salah satu karyanya yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Tafsir *al-Huda*, juga diterbitkan oleh perusahaan tersebut.

Bakri Syahid sangat berharap bisa mendapatkan anak lagi dari pernikahannya yang pertama itu, tetapi hingga bertahun-tahun anak yang ditunggu-tunggu tidak kunjung hadir. Mengetahui kenyataan tersebut, ayahnya diam-diam mulai resah. Ia kemudian mendesak Bakri Syahid untuk segera menikah lagi. Harapannya dengan menikah lagi, Bakri Syahid bisa mendapatkan keturunan. desakan ayahnya tersebut baru dilaksanakan oleh Bakri Syahid setelah pensiun. Dia menikah dengan seorang gadis mantan anak asuhnya yang

²⁹Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa*, h.33.

alumni Madrasah Mu'alimat bernama Sunarti. Gadis yang berasal dari Wonosari Gunung Kidul tersebut dinikahinya pada tahun 1983 yang dilakukan secara *sirri*. Dari pernikahannya yang kedua lahir dua orang anak. Anak pertama perempuan diberi nama Siti Arifah Manishati, sedangkan anak kedua laki-laki diberi nama Bagus Hadi Kusuma. Bersama dengan istri keduanya, Bakri Syahid tinggal di Jakarta. Meskipun demikian dia masih sering datang ke Yogyakarta untuk menjenguk istri pertamanya.³⁰

1. Pendidikan Bakri Syahid

Pendidikan Bakri Syahid dimulai sejak masih kanak-kanak di dalam keluarga di bawah bimbingan kedua orang tuanya. Pada masa ini, ia dibekali dasar-dasar pendidikan agama dan budi pekerti. Sedangkan pendidikan formalnya diperoleh dari kweekschool Islam Muhammadiyah (Sekarang Madrasah Muallimin) sampai lulus pada tahun 1935, setelah itu ia mendapat tugas dari Muhammadiyah untuk dakwah ke Sepanjang Sidoarjo Jawa timur, di sana ia bertugas sebagai guru H.I.S. Muhammadiyah. Tugas ini dijalannya selama beberapa tahun hingga kemudia ia dikirim ke Sekayu Bengkulu bersama kakak iparnya, Dahlan Mughani, hingga tahun 1942.

Pulang dari Bengkulu ia diangkat menjadi kepala Pusroh TNI AD di Jakarta. Setiap menjalankan tugas, Bakri Syahid selalu menunjukkan kinerja dengn semangat juang dan pengabdian yang bagus, karena itulah pada tahun 1957, ia diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang

³⁰*Ibid*, h.34.

perguruan tinggi, ia masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekarang UIN Sunan Kalijaga dan tamat pada tanggal 16 Januari 1963. Selanjutnya pada tahun 1964 ia mendapat tugas dari Jendral A. Yani (almarhum) untuk melanjutkan pendidikan militer di Fort Hamilton, New York, Amerika Serikat.³¹

2. Peran Sosial dan Politik Bakri Syahi

Bakri Syahid dikenal sebagai orang yang memiliki pribadi luhur seorang Jawa. Banyak orang yang menyebutnya demikian dikarenakan ia memiliki sifat-sifat layaknya kesatria Jawa, yaitu; penyabar (*lembah manah*), murah senyum (*sumeh*), sederhana serta tidak sombong. Bakri Syahid pun aktif di dalam kegiatan dakwah masyarakat sering mengisi ceramah di kegiatan-kegiatan agama pada waktu itu, pernah juga mengisi ceramah di alun-alun Utara bersama dengan Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono ke-IX, beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial lainnya, salah satu contohnya ia ikut serta aktif dalam merintis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang pada akhirnya ia dipercaya untuk menjadi rektor pertama Universitas kebanggaan warga Muhamadiyah di daerah Yogyakarta tersebut.³²

Selain dikenal dengan orang yang memiliki pribadi luhur seorang Jawa ia juga dikenal sebagai seorang militer yang memiliki perhatian besar terhadap

³¹Lihat, "Cacala Saking Penerbit Bagus arafah", Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: Bagus Arafah, 1983), h. 9.

³² Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa*, h.39.

dunia akademik dan intelektual. Selama karirnya di militer ia dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan penting, diantara jabatan yang pernah diembannya adalah: Komandan Kompi, Wartawan Perang No. 6-MBT, Kepala Staf Batalion STM-Yogyakarta, Kepala Pendidikan Pusat Rawatan Ruhani Islam Angkatan Darat, Wakil Kepala Pusroh Islam Angkatan Darat, Asisten Sekertaris Negara RI, dan jabatan terakhirnya dalam dunia kemiliteran adalah sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari fraksi ABRI.³³

3. Pengaruh latar belakang militer terhadap keluarga

Latar belakang Bakri Syahid yang merupakan seorang militer ternyata sangat berpengaruh juga terhadap keluarganya, Bakri Syahid dalam mendidik kedisiplinan, sudah ditanamkan sejak dini kepada anak-anaknya seperti ketika disiplin dalam beribadah seperti shalat dan mengaji, sehingga sampai sekarangpun masih mereka rasakan bagaimana pengaruh kedisiplinan ayahnya, walaupun mereka berhubungan intens dengan sang Ayah hanya kurang lebih selama 10 tahun. Kemudian mereka mengenal sosok sang ayah lebih lengkap dengan Biografinya dan dari cerita-cerita para saudara dan tetangga.³⁴

Bakri Syahid merupakan sosok seorang pejuang dimata keluarganya, tidak hanya merupakan pejuang bangsa beliau juga merupakan pejuang umat, di mana selama beliau masih sehat beliau terus berdakwah, tidak jarang

³³ Lihat, "Cacala Saking Penerbit Bagus arafah", Bakri Syahid, h. 9.

³⁴ Wawancara dengan Sunarti (65 th), istri kedua Bakri Syahid, melalui telepon pada tanggal 21 Februari 2017.

beliaupun berdakwah bersama Sultan Yogyakarta ke-IX, Bakri Syahid Juga banyak mengisi ceramah-ceramah agama, seperti dalam momen hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Bakri Syahid juga pernah di undang untuk ceramah di alun-alun Utara bersama Sultan Yogyakarta.

Di mata keluarga Bakri Syahid merupakan seorang pribadi yang luhur dan mempunyai kepribadian seorang kesatria Jawa, sikap beliau yang tegas, disiplin, penyayang, penyabar dan *tepo sliro* (mawas diri).

4. Karya-karya Bakri Syahid

Selain menafsirkan al-Qur'an yang diberi judul *Al-Huda tafsir Qur'an Basa Jawi* tidak sedikit pula karya tulis yang menjadi karya beliau, baik itu di tulis ketika ia masih menjadi mahasiswa maupun setelah ia menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga, diantaranya adalah:³⁵

Di bidang ilmu Negara/ Pemerintahan, yaitu;

1. *Tata Negara R.I*
2. *Pertahanan Keamanan Nasional*
3. *Ilmu Kewiraan*, dan
4. *Ideologi Negara Pancasila*.

Di bidang ilmu Sosial, yaitu; *Ilmu Jiwa Sosial*, kemudian di dalam bidang ilmu agama, adalah;

1. *Kitab Fiqih*

³⁵ *Ibid*, h. 9.

2. *Kitab 'Aqaid*

Semu buku-buku karya Bakri Syahid ini di terbitkan oleh penerbit Bagus Arafah, jalan H. Agus Salim No. 21, Yogyakarta, telvon: 2476.³⁶

B. Tafsir Al-Huda

Dalam khazanah kajian al-Qur'an di Indonesia, Tafsir *al-Huda* merupakan salah satu kategori dalam tafsir berbahasa Jawa dari penafsiran al-Qur'an berbahasa Jawa lainnya seperti: *Tafsir al-Qur'an Suci Basa Jawi* karya Prof. K.H.R. Mohammad Adnan, Solo Jawa Tengah pada tahun 1977 M, *Al-Ibrîz li Ma'rîfah Tafsîr al-Qur'an al-'Azîz* karya K.H. Bisri Mustafa dari Rembang Jawa Tengah, *Al-Iklîl fî Ma'âni al-Tanzîl* karya K.H. Misbah bin Zainul Mustafa dari Bangilan, dll.

1. Sejarah Penafsiran *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*

Sejarah penafsiran tafsir *al-Huda* tidak banyak diketahui orang lain, termasuk keluarga dan saudara-saudaranya. Menurut imam Muhsin dalam penelitiannya menyebutkan salah seorang yang diharapkan tau akan sejarah tafsir al-Huda adalah istri pertama dari Bakri Syahid, tetapi sayangnya keterangan tersebut tidak mungkin didapat darinya, karena istri pertamanya

³⁶ *Ibid*, h. 9.

telah memasuki usia lanjut dan tidak memungkinkan lagi untuk mengingat-ingat kejadian yang telah berlalu begitu lama.³⁷

Informasi yang cukup jelas penulis peroleh dari pemaparan pengarangnya sendiri yang ditulisnya pada kata pengantar (*Purwaka*) dalam tafsir *al-Huda*. Dalam kata pengantarnya disebutkan bahwa penafsiran tafsir *al-Huda* mulai ditafsirkan ketika ia mengemban tugas sebagai Karyawan ABRI di Sekertaris Negara Republik Indonesia dalam Bidang Khusus, pada tahun 1970 sampai ia menjabat sebagai rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekarang UIN Sunan KaliJaga pada tahun 1972 smpai tahun 1976.³⁸

Gagasan penyusunan tafsir *al-Huda* muncul saat Bakri Syahid mengikuti sarasehan yang dilaksanakan di Makah dan Madinah bertempat dikediaman Syekh Abdulmanan pembesar para Syekh di Saudi Arabia. Dalam sarasehan ini banyak pihak yang terlibat, antara lain mitra dari Jakarta dan dari daerah transmigrasi, sahabat lama dan baru yang berasal dari suriname, teman-teman Jama'ah Haji pada tahun 1955 dan tahun 1971, kemudian masyarakat jawa yang merantau di Singapura, Muangthai dan Philipina. Dalam srasehan tersebut terungkap akan keprihatinan terhadap minimnya tafsir *al-Qur'an* berbahasa Jawa dengan huruf latin, yang disertai tuntunan membaca *al-Qur'an* dan keterangan penting penjelasannya. Hal inilah yang

³⁷ Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa*, h. 42.

³⁸ Bakri Syahid, *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 8.

dijadikan motivasi Bakri Syahid untuk menafsirkan al-Qur'an berbahasa Jawa, dan pada akhirnya membawakan hasil sebuah kitab tafsir yang diberi nama "*Al-Huda Tafsir Qur'an Basa jawi*".

2. Percetakan *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*

Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi di terbitkan pertama kali pada tahun 1979 M oleh penerbit Bagus Arafah Yogyakarta. Bagus Arafah merupakan perusahaan yang didirikan oleh Bakri Syahid yang salah satu usahanya bergerak di bidang penerbitan. Nama Bagus Arafah ini diberikan untuk mengenang almarhum anak pertamanya dari istri tuanya yang diberi nama Bagus Arafah.³⁹

Sunarti yang merupakan istri kedua Bakri Syahid ketika diwawancarai oleh Imam Muhsin menyatakan bahwa sejak diterbitkan pertama kali, tafsir *al-Huda* telah mengalami cetak ulang kurang lebih sebanyak delapan kali, dan setiap kali cetak jumlahnya tidak kurang dari 1000 hingga 2000 eksemplar. Hasil cetakan tafsir *al-Huda* pada umumnya diedarkan di kalangan masyarakat Jawa yang tinggal di Indonesia, tetapi ia juga pernah dicetak untuk memenuhi permintaan masyarakat Jawa yang tinggal di Suriname. Selain cetakan yang pertama, tafsir *al-Huda* biasanya diterbitkan bersamaan dengan penerbit lain, seperti penerbit Piladi di Jakarta dan penerbit Persatuan di Yogyakarta. Namun sejak Bakri Syahid meninggal pada tahun 1994 kerjasama itu tidak dilanjutkan, sedangkan penerbit Bagus Arafah yang

³⁹ Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa*, h. 43.

merupakan penerbit pertama bagi tafsir *al-Huda* juga sudah ditutup. Sejak saat itulah tafsir *al-Huda* tidak pernah diterbitkan lagi. Menurut keterangan istri kedua Bakri syahid, faktor penyebabnya adalah tidak adanya pihak keluarga yang mau mengelola dan bertanggung jawab dalam proses penerbitan tafsir *al-Huda*.⁴⁰

3. Metode Penulisan *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*

Penulisan tafsir *al-Huda* di mulai sejak Bakri Syahid masih bertugas sebagai karyawan ABRI di Sekertaris Negara Republik Indonesia dalam Bidang Khusus pada tahun 1970. Tafsir *al-Huda* di tulis dengan bahasa daerah (bahasa Jawa) disertai dengan transliterasi teks al-Qur'an dalam huruf Latin.

Tafsir *al-Huda* memuat seluruh al-Qur'an yang terdiri dari 114 surat dalam 30 juz. Penulisannyapun disajikan secara urut sesuai dengan sistematika penulisan al-Qur'an dalam *Mushhaf* Usmani, yaitu dimulai dari surah *al-Fâtihah* dan diakhiri dengan surah *an-Nâs*.⁴¹ Pembahasan setiap surat dalam al-Qur'an selalu diawali dengan mengemukakan ciri-ciri khusus dari surat tersebut, meliputi nama surat, nomor urut surat, jumlah ayat, kelompok turunya surat (*Makkiyah/Madaniyyah*), dan urutan surat dalam proses trunnya. Contohnya:

*Al-BAQARAH (SAPI WADON)*⁴²
Surat kaping 2 : 286 ayat

⁴⁰ *Ibid*, h. 44.

⁴¹ Bakri Syahid, "Sambutan Majelis Ulama Daerah istimewa Yogyakarta", *al-Huda tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: Bagus Arafah, 1983), h. 15.

⁴² Bakri Syahid, *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 19.

Tumuruning wahyu ana ing Madinah, dadi wiwitane Surat kang tumurun ana ing Madinah, kajaba ayat 281 tumurun ana ing Mina nalika Haji Wada'.

“AL-BAQARAH (SAPI BETINA)”

Surat no. 2 : 286 ayat

Turunya wahyu di kota Madinah, jadi dari awal surat turun di kota Madinah, kecuali ayat 281 yang turun di Mina ketika menjalankan Haji Wada'.

Pembahasan selanjutnya diteruskan dengan menyajikan materi utama dalam tafsir al-Huda yang terdiri dari empat hal, yaitu:

- a. Teks ayat-ayat al-Qur'an dalam bahasa aslinya (Arab) yang ditulis di sisi kanan.
- b. Transliterasi bacaan al-Qur'an dalam huruf latin yang ditulis di bawah teks asli, (dalam penulisan transliterasi teks Arab ke dalam aksara Latin, metode yang digunakan tafsir *al-Huda* mengacu pada pedoman transliterasi yang dikeluarkan oleh departemen Agama RI.
- c. Terjemah ayat-ayat al-Qur'an dalam bahasa Jawa yang ditulis di sisi kiri.
- d. Keterangan atau penjelasan makna ayat al-Qur'an dalam bahasa Jawa yang ditulis di bagian bawah dalam bentuk catatan kaki.

Di akhir pembahasan surat, dikemukakan pokok-pokok bahasan tentang hubungan antara kandungan surat yang baru saja dibahas dengan kandungan surat berikutnya. Dalam hal ini dalam tafsir al-Huda banyak menggunakan istilah, seperti: “interkorelasi”, “*comparativ-study of Qur'an*”, “*comparative study*”, “*intisarinig sesambetan*” dan “*gegayutaning katerangan*”. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda-beda pada dasarnya memiliki maksud yang

sama mengenai penjelasan hubungan persesuaian antara kandungan surat yang satu dengan surat yang lain.⁴³

Penjelasan dalam tafsir *al-Huda* dapat di bedakan menjadi empat macam berdasarkan atas tanda yang dipergunakan, empat tanda tersebut adalah:⁴⁴

- 1) Angka (1,2,3, dst.), tanda ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kandungan ayat al-Qur'an atau untuk menjelaskan istilah khusus yang terdapat pada ayat.
- 2) Satu bintang (*), tanda ini digunakan untuk menerangkan suatu masalah yang dapat dirujuk pada "*Keterangan Sawatawis ingkag Wigatos Murakabi*" yang terdapat di bagian akhir tafsir *al-Huda*, atau masalah lain yang bersifat umum
- 3) Dua bintang (**), tanda ini digunakan untuk menjelaskan secara singkat tentang masalah yang bersifat khusus.
- 4) Tiga bintang (***), tanda ini digunakan untuk menjelaskan tentang *munâsabah* antar surat yang sebelum dan yang akan ditafsirkan.

Pengarang tafsir *al-Huda* dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasar pada pengetahuan dan pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, dan untuk mendukung pembahasan dalam penjelasan ayat pengarang

⁴³ Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa*, h. 50.

⁴⁴ *Ibid*, h. 55.

menggunakan sumber rujukan, baik berupa buku maupun tulisan-tulisan lainnya.⁴⁵ Buku-buku atau tulisan-tulisan tersebut adalah:⁴⁶

- 1) Rujukan berupa al-Qur'an dan tafsir, antara lain;
 - a. Abdul Jalil 'Isa, *al-Mushhaf al-Muyassar*.
 - b. Sayid Quthub, *fi Dhillâl al-Qur'ân*.
 - c. Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghi*.
 - d. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*.
 - e. A. Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*.
 - f. Prof. Dr. T.M. Hasbi Ashshiddiqy, *al-Nur: Tafsir al-Qur'ân al-Majîd*.
 - g. Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya, *Cathetan Pribadi, Kuliah Tafsir al-Qur'an*.
 - h. Ahmad Hasan, *Tafsîr al-Furqân*.
 - i. Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*.
 - j. *Al-Qur'an al-hakim*, Pakistan, 1935.
 - k. Ki Bagoes H. Hadikoesoemo, *Hikmah Qoeraniyah – Poestaka Hadi*.
- 2) Rujukan buku dalam bidang ilmu sosial kebudayaan jawa dan serat, yaitu;
 - a. W.J.S. Poerwodarminta, *Kawi Djarwa*, Bale poestaka.
 - b. Kanjeng Susuhunan Kalidjaga, *Kidoengan*.
 - c. K. G. P. A. A. Mangkunegaran IV, *Serat Wedha Tama*.

⁴⁵ Bakri Syahid, *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, , h. 8

⁴⁶ *Ibid*, h. 13.

- d. Kanjeng Susuhunan Paku Buwono IV, *Serat Wulangreh*.
 - e. Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, *Pitulas Warni-warni Karangnipun*.
 - f. *Kalawarti al-Jami'ah*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
 - g. W.J.S. Poerwodarminta, *Baoesastra Indonesia – Djawi*, Gunseikanbu- Kokumin Tosyokyoku.
 - h. Drs. Sidi Gazalba, *Islam Integrasi Ilmu dan Kebudayaan*.
 - i. Drs. Romdlon, *Kepercayaan Masyarakat Jawa*.
 - j. Prof. Dr. R. M. Ng. Poerbotjaroko dan Tardjan Hadidjaja, *Kapoestakan Djawa*, 1952.
- 3) Rujukan buku dalam ilmu Agama, yaitu;
- a. M. Natsir, *Fiqhud Da'wah*.
 - b. Prof. K. H. R. Muhammad Adnan, *Tuntunan Iman dan Islam*.
 - c. Muhammadiyah Majlis Tabligh, *Tuntunan Salat*, 1943.
 - d. Pusroh Islam Angkatan Darat, *Himpunan Do'a-do'a*, 1967.
 - e. Direktorat Jendral Urusan Haji, *Manasik Haji dan Do'a Ziarah*, 1970.
 - f. Majlis Tarjih, Pusat Pimpinan Muhammadiyah, *Kitab Iman dan Sembahyang*, 1929.
 - g. Prof. Dr. A. Sjalabi, *Sedjarah dan Kebudayaan Islam*, 1971.
 - h. K. R. Muhammad Wardan, *Kitab Falak dan Hisab*, 1957.
- 4) Rujukan buku dalam ilmu Negara, yaitu;

- a. *Panel Discussion Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, Yogyakarta, 1977.
 - b. Kolonel Drs. H. Bakri Syahid, *Ilmu Kewiran*, 1976.
 - c. Presiden Soeharto, *Kata Terpilih*, Departemen Penerangan RI, 1970.
 - d. Drs. H. Bakri Syahid, *Ideologi Negara Pancasila*.
 - e. Departemen Pertahanan Keamanan RI., *Dharma Pusaka 45*, 1972.
- 5) Rujukan buku-buku berbahsa asing, yaitu;
- a. Zoetmulder S. J. Dr. P. J., *Pantheisme en Monisme*.
 - b. Rinkers, Dr. D. A., *De Heiligen van Java*.
 - c. *Encyclopedia of Social sciences*.
 - d. Sayyid Abdul A'la al-Maududi, *Islamic Way of Life*, 1967.
- 6) Dalam bidang umum, yaitu;
- a. Simposium IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Mengamankan Sila Ketuhanan Jang Maha Esa*, 1970.
 - b. Prof. Harsojo, *Pengantar Antropologi*, 1967.

Setelah pembahasan seluruh al-Qur'an selesai kemudian dilanjutkan dengan menyajikan do'a *khatam* al-Qur'an kemudian di akhir tafsir *al-Huda* di tulis sebuah lampiran dengan judul "*Katarangan Sawatawis ingkang Wigatos Murakabi*" (Keterangan singkat yang penting dan mencukupi). Lampiran ini terdiri dari enam bab, yaitu:⁴⁷

⁴⁷ Bakri Syahid, *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 1325.

- a. Bab Pertama, Membahas Kitab Suci al-Qur'an yang berisi pembahasan tentang *Tatakrami maos Qur'an* (tata krama membaca al-qur'an), Definisi al-Qur'an, *Tehnis tumurunipun al-Qur'an* (teknis turunnya al-Qur'an), *Rumeksa Kamurnianipun al-Qur'an* (menjaga kemurnian al-qur'an), *Riwayat para andhika Nabi ing salebeting al-qur'an* (Riwayat para Nabi di dalam al-Qur'an), *mushhafusy syarîf saking* edisi Pakistan dan *Sujud Tilawah*.⁴⁸
- b. Bab Kedua, Membahas Rukun Islam yang berisi pembahasan tentang; syahadat *kakalih*, Ibadah Shalat, Ibadah *Shiyam*, Ibadah Zakat dan Ibadah Haji.⁴⁹
- c. Bab Ketiga, Membahas Rukun Iman, bab ini memuat tentang Rukun Iman yang enam.⁵⁰
- d. Bab Keempat, Membahas tentang Safaat.
- e. Bab Kelima, Membahas tentang *Kebecikan (al-Birru)* yang berisi tentang dua pembahasan, yaitu; *Filsafat Islam mawas gesang ing 'Alam Donyan dumugi gesang langgeng ing Alam akherat* dan *Nyinau lan nindakake Agami Islam*.⁵¹
- f. Bab Keenam, adalah *Hayuning Bawana* sebagai kata penutup dari pengarang.

⁴⁸*Ibid*, h. 1325-1330.

⁴⁹*Ibid*, h.1330-1352.

⁵⁰*Ibid*, h.1352-1355.

⁵¹*Ibid*, h. 1362.

Seluruh tampilan tafsir al-Huda di akhiri dengan daftar isi kemudian di lembar terakir terdapat indeks dari setiap surat (*isi maksud ingkang wigatos*).⁵²

4. Metode Penafsiran *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*

Seorang mufasir pastilah memerlukan metode untuk menafsirkan al-Qur'an. Diantara metode-metode dalam menafsirkan al-Qur'an adalah: Metode Global (*Ijmâli*), Metode Analitis (*Thlîli*), Metode Komparatif (*Muqârin*) dan Metode Tematik (*Maudhû'î*).⁵³

Dari metode-metode yang telah disebutkan diatas tampaknya *al-Huda* adalah tafsir yang menggunakan gabungan antara metode global (*ijmâli*) dan metode analisis (*tahlîli*).⁵⁴ Metode pertama di dasarkan atas penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan pengarangnya secara ringkas dan sederhana sehingga mudah dicerna dan dipahami, penafsiran dalam tafsir *al-Huda* yang dapat dikelompokkan ke dalam metode global (*Ijmâlli*) adalah penafsiran-penafsiran yang biasanya diawali dengan kata-kata penjelas, seperti; *maksudipun....., inggih punika...., artosipun...., kadosta... dan tegesipun.* Sebagai contoh pada penafsiran Q.S. al-Baqarâh ayat 34:

*“Maksudipun sujud punika atur pakurmatan, sanes nyembah kados manembah dhumateng Allah.”*⁵⁵

(“Arti dari sujud disini adalah menghormati, bukan berarti menyembah seperti menyembah kepada Allah.”)

⁵² *Ibid*, h.1377.

⁵³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet.1, hlm. 9.

⁵⁴ Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa*, h.76.

⁵⁵ Bakri Syahid, *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 25.

Pada penafsiran di atas tampak ringkas dan jelas hingga begitu mudah untuk dipahami oleh pembacanya.

Metode yang kedua adalah metode analisis (*tahlili*), metode ini di dasarkan atas penafsiran pengarang terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan secara panjang lebar dan mencakup berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an, serta memiliki kecenderungan tertentu.⁵⁶ sebagai contoh pada penafsiran Q.S. an-Nûr ayat 28:

“Tata krami utawi etic wonten bebrayan sanaoso namung perkawis lumebet griya, wonten syari’at Islam, dipun pernata ingkang sasae-saenipun, adhedasar muri sami dene dipun tindakaken. Malah wonten ing panggula wentahing dhidhikan wiwit lare ing Taman Kanak-kanak utawi ing ke Pramuka-an, uluk salam badhe mlebet sekolah, mlebet Langgar lan mlebet Mesjid, sarta mlebet kantor Pmerintah lan sapanunggilanipun punika penting sanget dipun lestantunaken uluk salam. Makaten suraosing ayat no. 27- no. 28. Para sutrisna, kathah sanget para pinisepuh sami prihatos kados pundi unggah-ungguhing para Mudha-Mudhi ing zaman tehnologi-modern punika sami kirang dipun prihatosaken, umpami badhe langkung ing ngajengipun tiyang sepuh, unyuk-unyuk tanpa mendhak, katingal pating delajing. Ing mangka manawi para Ibu lan Bapak, sarta Guru kersa, sarana arif lan simpatik, kersa anggegulang nyontoni ingkang praktis, tamtu para Mudha-Mudhi badhe purun nindakaken. makaten ugi para nem-neman sami tamu-mertamu wonten dalemipun mitra lan tangga tepalih sapiturutipun, punika prayogi sanget wonten ing gerakan Ibu-ibu ing PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) ing kampung lan Dhusundusun, kadangkala dipun pentasaken contoh tuladhanipun pergaulan sasami nem-neman, kakung miwah putri (langkung-langkung wanita kedah langkung prigel lan merak ati) supados angrembakakaken kabudayaan kita Indonesia piyambak saking falsafah Pancasila, lan dipun kiyataken dening piwucal syare’ating Allah SWT. Sampun ngantos ing mangkenipun manawi Negari kita majeng ekonomi, tehnik lan modern, sarta makmur, ananging kasusilan kita risak dening kesusupan kabudayan sanes ingkang cengkah kaliyan falsafah kita lan

⁵⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet.11, hlm.58.

geseh kaliyan Agami kita.badhe kadospundi ngeres lan nalangsa kita sadaya, pakewet kula ngaturaken! Sabab bangsa Indonesia boten gadhah cita-cita ambangun Masyarakat sekuler (masyarakat tanpa Agami), nanging Masyarakat Pancasila!''⁵⁷

Inti pada penafsiran ini menyatakan bahwasannya bangsa Indonesia tidak memiliki cita-cita membangun masyarakat sekuler (masyarakat tanpa agama), melainkan masyarakat Pancasila.

Dari penafsiran ayat di atas terlihat begitu jelas bagaiman mufasir menjelaskan ayat tersebut dengan panjang lebar dan mencakup berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir.

5. Corak Tafsir *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*

Setiap Mufasir pastilah memiliki kecenderungan dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini disebabkan oleh pengaruh keilmuan mufasir, latar belakang penafsiran bahkan latar belakang kehidupan dari seorang mufasir. Dan kecenderungan mufasir inilah yang menimbulkan adanya corak tafsir dalam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, corak-corak tafsir tersebut, antara lain: Corak Tasawuf (*Syufi/asyâri*), Corak Fiqh, Corak Filsafat (*falsafi*), Corak Ilmiah (*Ilmî*), Corak Sosial Kemasyarakatan (*Ijtimâ'i*), Corak Sastra (*Adabî*), dll.⁵⁸

Melihat pada sub bab sebelumnya yang membahas tentang metode penafsiran dari tafsir *al-Huda*, yang mana dalam penafsirannya menggunakan

⁵⁷ Bakri Syahid, *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 670.

⁵⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, h. 9.

metode analitis (*tahlîlî*) maka dengan melihat dari metode penafsiran itu penulis disini mengambil kesimpulan bahwa tafsir *al-Huda* adalah Tafsir yang memiliki corak sosial kemasyarakatan (*Ijtimâ'î*). Hal ini karena dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sang mufasir banyak mengkaitkan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Sebagai contoh, dalam penafsiran terhadap Q.S al-Nâhl ayat 51-55, penjelasan tafsir al-Huda adalah sebagai berikut:

“Ayat no. 51-55 saged kagerba wigatosipun makaten: wonten ewah-gingsiring masyarakat (social change) punika angsal pengaruh 4 faktor: 1. Fisis geografis, 2. Biologis, 3. Tehnologi, 4. Kabudayan (kultural). Sering sanget tuwuh ontran-ontran sosial utawi konflik-konflik masyarakat sabab saking owahgingsiring sosial (masyarakat). Ing mangka social change punika sampun dados kodrating alam bebrayaning manungsa. Dados kedah ingkang permana, ngatos-atos lan enget ing Pangeran sarta waspada, sampun anggersula, bingung lan telas pangajeng-ajeng saking sihing pangeran. Sinten tiyang ingkang tansah enget ing Allah, penggalhipun badhe wiyar lan kathah iguh pratikel kangge mbangun Bangsa lan Negara.”⁵⁹

(Ayat no. 51-55 kandungan isinya dapat diringkas sebagai berikut: bahwa dalam perubahan sosial (*social change*) pada dasarnya dipengaruhi oleh 4 faktor: 1. Fisis geografis, 2. Biologis, 3. Teknologis, dan 4. Kebudayaan (kultural). Sering kali terjadi gejolak sosial atau konflik-konflik sosial akibat adanya perubahan sosial itu. Padahal *social change* (perubahan sosial) tersebut sudah menjadi sunnatullah bagi kehidupan manusia. Jadi harus dihadapi dengan bijaksana, hati-hati dan ingat kepada Tuhan serta waspada, tidak boleh kecewa, bingung dan pesimis terhadap rahmat Tuhan. Siapapun yang selalu ingat dengan Tuhan, pemikiran atau penalarannya akan luas dan banyak memiliki inisiatif untuk membangun bangsa dan negara.)

Pada penfsiran diatas menjelaskan tentang pelajaran perubahan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penafsiran di atas juga

⁵⁹ Bakri Syahid, *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h.493.

menyebutkan sikap yang paling baik ketika terjadi perubahan sosial, yaitu ingat kepada Tuhan, karena dengan ingat kepada Tuhan ia akan dapat menghadapi perubahan sosial dengan tenang dan penuh percaya diri.

Dilihat dari penafsiran ayat al-Qur'an di atas, terlihat jelaslah bagaimana tafsir al-Huda berusaha mengkaitkan pengertian suatu ayat dengan kondisi dan situasi sosial masyarakat, hal ini terjadi karena adanya pengaruh latar belakang keilmuan dan pengaruh kondisi sosial-budaya mufasir pada saat itu.

6. Kelebihan dan kekurangan tafsir *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*

Kehadiran tafsir *Al-Huda* telah memberikan warna tersendiri dalam khazanah kajian al-Qur'an berbahasa daerah di Indonesia, hal ini dikarenakan bahasa Jawa yang digunakannya serta format penyusunannya yang berbeda dengan karya-karya tafsir sejenis yang lain, perbedaannya dengan tafsir sejenis yang lain adalah disertakannya transliterasi teks al-Qur'an dalam huruf latin serta di bagian akhir tafsir terdapat do'a-do'a dan tuntunan shalat lengkap dengan tatacara serta gambarnya. Tafsir *al-Huda* juga merupakan karya dari mufasir yang berlatar belakang seorang militer, yang mana latar belakang ini tidak dimiliki oleh para penafsir yang sejenis lainnya, hal inilah yang menjadikan tafsir *al-Huda* memiliki daya tarik tersendiri.

Sebuah karya tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, kiranya hal-hal yang telah penulis sebutkan di atas adalah menjadi kelebihan dari tafsir ini, sedangkan kekurangan dari tafsir ini adalah merupakan

kelebihannya juga yaitu tafsir ini menggunakan bahasa daerah (Jawa) sehingga perlu pendalaman khusus atau penerjemah bagi para pembaca tafsir ini khususnya bagi para pembaca dari luar daerah Jawa.

BAB III

PENGERTIAN PEMERINTAHAN

A. Makna Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:⁶⁰

1. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau orang elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti petihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Pemerintahan sendiri terdiri dari lembaga-lembaga yang saling berkesinambungan demi terwujudnya negara yang di idam-idamkan masyarakatnya yaitu negara yang adil dan makmur. Lembaga-lembaga dalam pemerintahan tersebut adalah:

1. Legislatif

Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, karena itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat; nama lain yang sering dipakai ialah Parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum dengan jalan menentukan

⁶⁰ Inu Kencana Syafie, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 3.

kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Badan legislatif pun memiliki hak, diantaranya;

- a. Hak bertanya: anggota badan legislatif berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal.
- b. Hak interpelasi: anggota badan legislatif berhak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya tentang suatu bidang.
- c. Hak angket: anggota badan legislatif berhak untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk hal ini dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif yang lain dan kemudian merumuskannya dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.
- d. Hak mosi: pada umumnya hak ini merupakan hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima suatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri.

2. Eksekutif

Lembaga eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokrasi badan eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-mentrinya. Yang menjalankan undang-undang dan menjalin hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

3. Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah sebagai lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dan mengadili pelanggar undang-undang dengan segala konsekwensinya, seperti mahkamah agung dan hakim.⁶¹

B. Sistem Pemerintahan

Secara teoretis, sistem pemerintahan dibagi dalam tiga klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan referendum. Klasifikasi sistem pemerintahan didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

1. Pertama, sistem pemerintahan disebut parlementer apabila pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.
2. Kedua, sistem pemerintahan disebut presidentil karena menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
3. Ketiga, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen.⁶²

Sebagai mana yang telah dituliskan Winarno dalam bukunya yang berjudul “*Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*” menyebutkan ciri-ciri pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidentil adalah sebagai berikut:

⁶¹ P. Anthonius Sitepu, *Teori-teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 51.

⁶² Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pradigma, 2010), h. 54.

Ciri-ciri Pemerintahan Parleментар, yaitu;⁶³

- a. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
- b. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang mempunyai peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
- c. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
- d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini menyatakan bahwa parlemen bisa menjatuhkan kabinet kapanpun jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan *mosi tidak percaya* kepada kabinet.
- e. Kepala negara tidak sekaligus kepala pemerintahan. Kepala negara adalah presiden dalam bentuk pemerintahan republik atau raja/sultan dalam bentuk pemerintahan monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.

⁶³ Winarno, *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Edisi Kedua, Cet. 8, h. 84.

- f. Sebagai imbang parlemen dapat menjatuhkan kabinet, kepala negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.⁶⁴

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidentil adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan negara ada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/mjelis.
- b. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
- c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
- d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
- e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
- f. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Sedangkan gambaran akan sistem pemerintahan Indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid*, h.84.

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. (Pasal 4 ayat 1)
2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 5 ayat 1)
3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (Pasal 5 ayat 2)
4. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat. (Pasal 6A ayat 1)
5. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 7C)⁶⁵
6. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Pasal 10)
7. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11 ayat 1)
8. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 12)
9. Presiden mengangkat duta dan konsul. (Pasal 13)
10. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnensi dan abolisi. (Pasal 14)
11. Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormtan. (Pasal 15)

⁶⁵ *Ibid*, h.86.

12. Presiden dibantu oleh menteri-mentri negara. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Pasal 17 ayat 1 dan 2)
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 ayat 1)
14. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (Pasal 20 ayaat 1)
15. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. (Pasal 20A ayat 1)

Dari ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang di atas dan menghubungkannya dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang telah disebutkan sebelumnya maka sistem pemerintahan Indonesia dapat di kategorikan kedalam sistem pemerintahan presidentil. Karena ciri-ciri sistem presidentil terlihat jelas pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yg telah disebutkan di atas. Mengingat juga bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan UUD 1945.

C. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem untuk mengatur perlengkapan negara dan hubungan antara perlengkapan negara.⁶⁶

Bentuk-bentuk pemerintahan, secara garis besar terbagi menjadi enam, yaitu:⁶⁷

⁶⁶ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 256.

⁶⁷ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), Cet. III, h. 153.

1. Aristokrasi, adalah pemerintahan oleh Aristokrat (cendekiawan) sesuai dengan pikiran keadilan. Tampak kepemimpinan dikuasai oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan.
2. Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan belaka.
3. Oligarchi, yaitu pemerintahan oleh para (golongan) hartawan. Tampak kepemimpinannya dikuasai oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok (golongan)-nya sendiri.
4. Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Tampak kepemimpinannya dikuasai oleh segenap lapisan, untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya.
5. Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Tampak kepemimpinannya dikuasai oleh satu orang untuk kepentingannya sendiri.
6. Monarchi, yaitu pemerintahan yang berbentuk kerajaan, dikuasai oleh satu orang dengan sistem tertentu guna kepentingan seluruh rakyat.

Seiring berkembangnya zaman bentuk-bentuk pemerintahan di atas tidak lagi dianut oleh banyak negara. Adapun bentuk pemerintahan yang dianut atau diterima dewasa ini adalah bentuk pemerintahan modern menurut Nicollo Machiavelli, yaitu: *Monarki atau kerajaan* dan *republik*. Hal ini di dasarkan atas cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara. Bentuk pemerintahan disebut republik apabila cara pengangkatan kepala negara

melalui pemilihan. Sedangkan bentuk pemerintahan monarki pemilihan kepala negaranya di daraskan atas garis turunan atau pewarisan secara turun temurun..⁶⁸

Melihat dari pemaparan tentang bentuk pemerintahan di atas maka, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik hal ini dilihat dari cara negara Indonesia dalam pemilihan kepala negara. Dan berdasarkan atas UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Sedangkan Demokrasi di Indonesi kini bukan lagi demokrasi dalam arti bentuk pemerintahan melainkan demokrasi dalam arti sebagai sistem pemerintahan. Untuk lebih mengetahui demokrasi di Indonesia maka dalam penelitian ini terlebih dulu menjelaskan apa pengertian dari demokrasi tersebut.

Demokrasi dalam arti sistem pemerintahan/sistem politik adalah suatu sistem dalam negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁶⁹

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia di sesuaikan ke dalam priode pelaksanaan demokrasi itu sendiri, sedangkan priode demokrasi terdiri atas;⁷⁰

⁶⁸Basuki Rahardjo, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Persepektif Kependudukan*, (Yogyakarta:Gerbang Media, 2015), h. 44.

⁶⁹ Winarno, Pradigma Baru *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 95.

⁷⁰ Winarno, Pradigma Baru *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 105.

1. Pelaksanaan demokrasi masa Revolusi tahun 1945-1950
2. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama yang terdiri dari;
 - a. Masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959
 - b. Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965
3. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966-1998
4. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998-1999
5. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang.

Mengingat dalam penelitian ini penulis mengungkapkan pemikiria seorang tokoh dalam sebuah karyanya, maka jika penulis mengacu kepada tokoh tersebut dan waktu penyusunan karyanya, yang hidup pada era tahun 1970-1979 maka sistem pemerintahan di Indonesia pada waktu itu (Orde Baru) adalah Demokrasi Pancasila bersumberkan dari ideologi pancasila, yang mana pancasila pada waktu itu berfungsi sebagai cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat da menilai keputusan politik. Pancasila juga menjadialat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi.

D. Nilai-nilai Dasar Pemerintahan dalam Islam

Islam merupakan agama yang mana al-Qur'an menjadi dasar-dasar hukum dalam melaksanakan kehidupan. Baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Meskipun tidak di sebutkan secara eksplisit tentang pemerintahan tetapi dalam al-Qur'an telah mengandung prinsip-prinsip, nilai-nilai dalam suatu pemerintahan, antara lain:

1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kata “taqwa” mengandung makna upaya memelihara, menjaga, dan melindungi. Bertaqwa kepada Allah Swt adalah sikap takut dan tunduk dengan sepenuh jiwa dan raga, serta melindungi dan memelihara hak-hak-Nya, baik yang bersifat vertikal (*hablum minallâh*) maupun yang horisontal (*hablum minanâs*). Pemerintahan itu terkait erat dengan suatu cita-cita, oleh karena itu pemerintahan harus berada di dalam genggam tangan seorang pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.⁷¹ Allah Swt sudah tegas melarang kita mengangkat atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin/sebagai pemegang pemerintahan. Firman Allah Swt dalam surat Ali Imron ayat 28, yaitu:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).

Telah diterangkan oleh para ahli sejarah bahwa di antara orang-orang yang telah masuk Islam terpedaya oleh kemuliaan orang-orang kafir, lalu mereka mengadakan hubungan persaudaraan dan persahabatan yang akrab sampai menjadikan orang-orang kafir itu sebagai orang-orang yang dipercaya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut: “Adalah Al-

⁷¹ Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 249.

Hajjaj Ibnu Amru dan Ibnu Abil Huqaiq dan Qadis bin Zaid, ketiga-tiga dari golongan Yahudi mengadakan hubungan rahasia dengan sebagian orang Anshar supaya mereka mau berpaling dari agama Islam. Maka Rifa'ah bin Munzir, Abdullah bin Jubair, Saad bin Khaisamah mencengah mereka mendekati orang-orang yahudi itu. Tetapi orang-orang Anshar tersebut tetap saja mengadakan hubungan rahasia dengan mereka, maka turunlah ayat ini.

Di dalam ayat ini Allah Swt melarang kaum muslimin untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan yang akrab, pemimpin atau penolong, jika hal yang demikian ini akan merugikan mereka sendiri baik dalam urusan agama ataupun dalam kepentingan umat, atau jika dalam hal ini kepentingan orang kafir akan lebih didahulukan daripada kepentingan kaum muslimin sendiri. Apalagi jika hal itu ternyata akan membantu tersebarluasnya kekafiran. Hal yang demikian ini sangat dilarang oleh agama.⁷²

Allah Swt, mencegah orang-orang mukmin mengadakan hubungan akrab dengan orang-orang kafir, baik disebabkan oleh kekerabatan, kawan lama waktu zaman jahiliyah, ataupun karena bertetangga. Larangan itu tidak lain hanyalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan agama, serta agar kaum muslimin tidak terganggu dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah Swt. Adapun bentuk-bentuk pesahabatan dan persetujuan-persetujuan kerjasama yang kiranya dapat

⁷² *Ibid.*, h. 250.

menjamin kemaslahatan orang-orang Islam tidaklah terlarang. Nabi Muhammad Saw sendiri tidak pernah mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Khuza'ah, sedang mereka itu masih dalam syirik.⁷³ Dalam aplikasinya, taqwa mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Memelihara diri dari segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Swt seperti syirik, kufur, fasik, dan sebagainya. Dengan demikian, ia senantiasa berusaha menghadirkan perbuatan-perbuatan yang diridhai dan dicintai Allah dalam setiap aktivitas, atau dalam gerak dan diamnya.
- b. Memelihara diri dari segala perbuatan yang dapat merusak diri sendiri, seperti *nifq*, was-was, lemah keyakinan, dan sebagainya. Dengan demikian, ia akan selalu berupaya untuk beraktivitas dengan kativitas yang bermanfaat bagi peningkatan dirinya di hadapan Allah Swt dan makhluk-Nya.
- c. Memelihara diri dari segala perbuatan yang dapat merusak orang lain atau makhluk-Nya, seperti *fasid* (destruktif), *zhalim*, dan sebagainya.

2. Nilai Keadilan

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

⁷³ *Ibid.*, h. 250.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁷⁴

Dari ayat diatas, mengisyaratkan bahwasannya ada dua garis hukum yang dapat diambil, yaitu; Pertama, manusia diwajibkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kedua, manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Dalam konteks kekuasaan negara, perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber dari Allah Swt.⁷⁵

Keadilan merupakan salah satu aspek utama untuk tegaknya kebenaran di dalam suatu pemerintahan. Keadilan dimaksud berkaitan dengan berbagai banyak hal, salah satu diantaranya adalah perlakuan adil keadilan ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.⁷⁶

3. Musyawarah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنِهِمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

⁷⁴ Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Mushaf Al-Quran, *al-Qur'an dan Terjema*, h.88.

⁷⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 69.

⁷⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umt*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 413.

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”⁷⁷

Adanya upaya mencari pertimbangan atau musyawarah dilakukan oleh penguasa dengan melibatkan masyarakat atau perwakilannya. Meski ayat ini tidak secara eksplisit menunjukkan tentang musyawarah, namun upaya untuk meminta pertimbangan dan pandangan dari pihak lain dalam memutuskan suatu persoalan merupakan substansi dari yang disebut musyawarah. Sehingga akan mendapatkan keputusan yang baik untuk kemaslahatan bersama.

Sedangkan urusan yang dimaksud pada ayat di atas adalah hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Apabila nilai ini diterapkan dengan baik dan benar maka akan terwujudlah *baladun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.⁷⁸

4. Persatuan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh

⁷⁷ Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Mushaf Al-Quran, *al-Qur'an dan Terjema*, h.488.

⁷⁸ Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'an atas Masalah Sosial Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 204.

Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁷⁹

Untuk terbentuknya kekompakan di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini, bersikap menyamakan antara penduduk artinya dapat menerima perbedaan dalam persatuan atau sebaliknya. Sebagaimana semboyan negara ini “*Bhineka Tunggal Ika*”. Dari gambaran ayat di atas terlihat bahwa al-Qur’an menunjukkan bahwa manusia mempunyai kesamaan derajat di sisi Allah kecuali ketakwaan lah yang membedakannya. Bila nilai kesamaan ini dijalankan maka timbullah perstuan antara satu dengan yang lainnya. Dan hal ini lah yang dibutuhkan pemerintah agar terwujud sikap yang toleran dan menjadi perekat bagi persatuan bangsa dan negara.⁸⁰

5. Amanah

Amanah yaitu segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Swt, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Arti sesungguhnya dari penyerahan amanah kepada manusia adalah Allah Swt, percaya bahwa

⁷⁹ Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Mushaf Al-Quran, *al-Qur’an dan Terjema*, h.517.

⁸⁰ Nur Mahmudah, *Menelisik Visi Politik Al-Qur’an*, Jurnal Hermeneutik, Vol. 8, Nomor 1, 2012, h. 22.

manusia mampu mengemban amanah tersebut sesuai dengan keinginan Allah Swt.⁸¹

Pengertian amanah disini adalah hadirnya suatu kekuatan yang denganya seorang pemimpin mampu memelihara kemantapan ruhaninya, tidak berkeluh kesah bila ditimpa kesusahan, serta tidak berkhianat kepada Allah Swt dan rasul-Nya ketika menjalankan pesan-pesan ketuhanan-Nya dan pesan kenabian dari rasul-Nya, Muhammad Saw. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Amanah adalah titah Allah Swt yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang telah beriman kepada Allah Swt dan rasul-Nya. Sikap dan sifat amanah tersebut harus terimpementasikan dengan baik dan benar di dalam kehidupan ini,⁸² yakni:

⁸¹ Rachmat Ramadhana Al-Banjari, *Prophetic Leadership* (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 157.

⁸² *Ibid.*, h. 159-160.

- a. Menaburkan kerahmatan ketuhanan dalam diri, yaitu memelihara ruhani, jiwa, hati, akal, indra, dan perilaku agar senantiasa beraktifitas dalam garis-garis ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum-Nya.
- b. Menaburkan kerahmatan ketuhanan dalam lingkungan keluarga, yaitu membimbing dan mendidik istri dan anak-anak agar tumbuh dan berkembang di dalam ketaatan, keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan terhadap Allah Swt.
- c. Menaburkan kerahmatan ketuhanan dalam lingkungan kerja atau organisasi, yaitu membangun dan menghidupkan kepemimpinan yang adil, bijaksana, proporsional, dan profesional sehingga dapat tercipta suasana tenang dan damai, serta etos kerja dan kinerja yang berkualitas kenabian.
- d. Menaburkan kerahmatan ketuhanan dalam lingkungan sosial dan masyarakat, yaitu menjadi panutan dan *soko guru*, yang memberikan bimbingan dalam membangun kehidupan dalam masyarakat madani yang adil, makmur, dan merata.
- e. Menaburkan kerahmatan ketuhanan dalam lingkungan alam semesta raya, yaitu memelihara ekosistem, keseimbangan, dan kelangsungan hidup antar sesama makhluk ciptaan Allah Swt, dengan baik dan benar.

E. Tujuan Pemerintahan

Manusia dalam hidup nya terdapat tiga hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dipelihara dan mendapatkan jaminan institusi

pemerintah aatau negara. Ketiga hak dasar tersebut adalah, hak untuk hidup (*life*) tanpa rasa takut dan ancaman dari siapa pun, hak untuk hidup bebas (*liberty*) adalah hak untuk berbicara dan berekspresi untuk beragama dan bercita-cita, dan hak untuk memiliki sesuatu (*property*) baik materi maupun non materi. Pada dasarnya setiap orang tidak menghendaki hak-haknya diganggu atau dilanggar oleh siapapun, oleh karena itu dibentuklah pemerintahan guna melindungi serta menjamin hak-hak tersebut. Maka dari itu tujuan suatu pemerintahan adalah:⁸³

1. Menjaga satu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan mereka secara wajar.
2. Untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mencapai kemajuan bersama.
3. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

⁸³ A. Ubaidillah, *Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 96.

BAB IV
KONSEP PEMERINTAHAN MENURUT
BAKRI SYAHID

A. Ayat-ayat Pemerintahan dalam tafsir *Al-Huda*

Dari 6.251 ayat al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang pemerintahan, meskipun di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerintahan dalam al-Qur'an, untuk lebih fokusnya lagi yaitu pada tafsir *al-Huda*, yang mana tafsir *al-Huda* merupakan sumber primer pada penelitian ini.

Berdasarkan *research* penulis di dalam tafsir *al-Huda* terdapat 38 ayat, yang berkaitan dengan pemerintahan. Ayat-ayat tersebut adalah:

No	Kata Kunci	Ayat al-Qur'an	Keterangan
1	Khalifah	QS. Al-Baqârah, ayat; 30 QS. Sâd, ayat; 26	Pemerintahan pertama di bumi yaitu Nabi Adam, dan pemerintahan nabi Dawud pada masanya.
2	Uliil Amrî	QS. An-Nîsâ', ayat; 59 dan 83	Dalam ayat ini menerangkan bagaimana sikap pemerintah.
3	Ketuhanan	QS. An-Nîsâ', ayat; 59 QS. Al-A'râf, ayat; 26 dan 201. QS. An-Nûr, ayat; 28 dan 55.	Ayat-ayat di samping menjelaskan pemerintah harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

		<p>QS. Asy-Syu'arâ', ayat; 214.</p> <p>QS. As-Saff, ayat; 11.</p>	
4	Keadilan	<p>QS. An-Nîsâ', ayat; 58, 105, dan 135</p> <p>QS. Al-An'âm, ayat; 152 dan 153.</p> <p>QS. Al-A'râf, ayat; 129.</p>	Pemerintah wajib memiliki sikap adil dalam berbagai aspek untuk menjalankan pemerintahannya, baik dari segi hukum, politik, sosial dan ekonomi.
5	Kemanusiaan	<p>QS. Al-Mâidah, ayat; 32</p>	Pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan masyarakatnya.
6	Persatuan	<p>QS. Al-An'âm, ayat; 50, 51 dan 52.</p> <p>QS. Ar-Ra'd, ayat; 21.</p>	Pemerintah harus bisa mempersatukan seluruh masyarakat agar tercapai kekompakan dan persatuan di dalam sebuah tatanan Negara yang harmonis dan sejahtera.
7	Musyawaharah	<p>QS. At-Taubah, ayat; 122</p> <p>QS. An-Nûr, ayat; 62.</p> <p>QS. Asy-syûra, ayat; 38.</p>	Pemerintah wajib mengadakan musyawarah untuk mencari pertimbangan demi terbentuknya suatu keputusan dalam suatu permasalahan demi kemaslahatan bersama.
8	Kesejahteraan	<p>QS. An-Nîsâ', ayat; 53 dan 90.</p> <p>QS. Yûnus, ayat; 5.</p> <p>QS. Al-Hijr, ayat; 88.</p>	Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya baik itu dalam segi politik, sosial dan ekonomi.

		QS. Tâhâ, ayat; 131.	
9	Ketahanan Nasional	QS. Al-An'âm, ayat; 6. QS. As-Sajdah, ayat; 5. QS. Hujurât, ayat; 6 dan 7.	Ayat-ayat di samping menjelaskan tentang koordinasi pemerintahan dalam sebuah tatanan Negara.
10	Hukum	QS. Yûnus, ayat; 7 dan 19.	Ayat ini mengerangkan bahwasannya pemerintah adalah yang menentukan hukum serta yang mengatur jalannya suatu hukum di suatu negara agar tercipta negara yang adil dan makmur.
11	Kemerdekaan	QS. Al-Furqân, ayat; 2. QS. Al-Hadîd, ayat; 7. QS. As-Sâffât, ayat; 173.	Pemerintah berperan penting dalam terwujudnya suatu kemerdekaan, dalam bangsa dan negara serta kemerdekaan individu.

Dari pemaparan tabel diatas terlihat jelas bagaimana ayat-ayat al-Qur'an menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan meskipun tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan secara eksplisit kata pemerintahan tetapi ayat-ayat tersebut mengandung unsur-unsur yang sangat berkaitan dengan pemerintahan.

B. Penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat Pemerintahan

Setelah di sub bab sebelumnya penulis mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerintahan dalam tafsir *al-Huda*, maka penulis dalam sub bab ini mengungkapkan bagaimana penafsiran Bakri Syahid terhadap beberapa ayat tentang pemerintahan dalam karya tafsirnya *Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*. Agar para pembaca tahu bagaimana penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan pemerintahan. Diantara ayat-ayat itu adalah, sebagai berikut:

1. An-Nisâ', ayat; 59¹⁶⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“He para wong mu'min sira padha angestokna marang Allah, lan angestokna marang Rasul, sarta angestokna wong kang ngasta Pamerintahan saka sira kabh. Dene manawa sira padha pasulayan ana ing sawijining perkara, supaya sira padha ambalekake perkara iku marang Allah, (al-Qur'an) lan Rasul (Sunnahe) yen nyata sira iku padha iman ing Allah lan dina Akhir, kang mangkoo iku luwih becik sarta luwih prayoga akibat-kadadeane.”

Penafsiran Bakri Syahid: *“Tiyang ngasta Pemerintahan punika wajib iman ing Allah, iman dhumateng Rasulullah s.a.w, sarta nindakaken sadaya tatanan lan aturan agami Islam, manawi boten, tangeh lamun badhe sged damel adil-makmur materiil lan spirituil, karaharjan Donya lan Akherat.*

Bab punika cocok sanget kados ingkang kasebat ing “Wulang Reh” yasan dalem Ingkang Sinuhun Paku Buwono IV: “Lamun ana wong micareng ngelmi, tan mufakat ing patang perkara, aja sira age-age, anganggep nyatanipun, limbangen lan kang patag

¹⁶⁰ Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 88.

perkara rumuhun, Dalil, Hadits, lan Ijmak, Qiyase, papat iku salah siji, anaa kang mufakat". Tegesipun ilmu pengetahuan utawi kawicaksanaan paprentahan punika kedah cocok, boten kenging nyimpang, saking Dalil (Qur'an), Hadits Rasulullah s.a.w, Ijmak lan Qiyas; pramila kedah dipun teliti, sampun nilar angger-anggering Agama.¹⁶¹

Asbabun Nuzul: Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais, ketika ia diutus Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan perang. (HR.Bukhari).¹⁶²

Pada penafsiran ini terlihat bahwasannya menurut Bakri Syahid apabila orang yang memegang pemerintahan wajiblah beriman kepada Allah, beriman kepada rasulullah serta menjalankan semua syari'at dan aturan yang telah di tetapkan oleh agama, supaya tercapai kesejahteraan baik dalam material maupun sepiritualnya, serta untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam ayat ini Bakri Syahid juga menghubungkan dengan Serat *Wulang Reh* karya dari Sinuhun Paku Buwono IV, yang menyatakan bahwasannya barang siapa yang memegang pemerintahan maka wajib berpegang teguh kepada empat perkara, yaitu; Dalil (Qur'an), Hadis Rasulullah, Ijmak dan Qiyas.

2. An-Nisâ', ayat; 58¹⁶³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹⁶¹ Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h.147.

¹⁶² Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.88.

¹⁶³ *Ibid*, h. 88.

“Sanyata Allah dhawuh marang sira kabeh supaya sira padha amasrahake titipan marag kang andarbeni, lan manawa sira padha mutusi ana ing antaraning para manungsa, supaya sira mutusi sarana adil. Sanyata becik-beciking pitutur iku kang diparingake dening Allah marang sira kabeh, sanyata Allah iku kang Midhanget sarta kang Mriksani.”

Penafsiran Bakri Syahid: “Negarawan utawi sinten kemawon ngasta Pemerintahan wajib asifat jujur sarta adil ing sadaya aspek sosial, manawi mboten, tamtu kakisruhan ingkang badhe kadadosan!”.¹⁶⁴

Asbabun Nuzul: -

Pemaparan ayat diatas menunjukkan bahwasannya seorang yang memegang pemerintahan wajib lah bersikap adil dan jujur dalam aspek sosial maupun politik, demi terbentuknya suatu negara yang adil dan makmur serta menghindari hal-hal yang menimbulkan kekacauan dalam suatu negara.

3. QS. Al-Mâidah, ayat; 32¹⁶⁵

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Jalanan saka iku, Ingsun anetepake sawijining hukum tumrap Bani Israil, satemene sing sapa wongw mateni wong, kang mangka kang dipateni iku ora mateni sawijining wong, utawa ora sebab gawr rusak ing Bumi, mangka kaya-kaya dheweke iku

¹⁶⁴ Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 147.

¹⁶⁵ Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.114.

mateni wong sajad; lan sing sapa wonge nguripi sawijining wong, mangka kaya-kaya dheweke iku nguripi wong sajad. Lan yekti wus rawuh marang wong-wong mau para Utusan Ingsun kang ngampil pirang-pirang ayat tandha yekti kang padha nelahi, tumuli sawuse pepadhang iku akeh-akehe wong mau padha tumindak angliwati wates ana ing Bumi.”

Penafsiran Bakri Syahid: “Artosipun tiyang punika anggota masyarakat, dados sintea mejahi tiyang, sami kaliyan mejahi katurunanipun. Pramila hukum ingkang katetepaken tumrap Bani Israil kasebat, punika tegese hukum interasional ugi (kangge manungsa sa Donya!), lan salah satunggaling hak asasi lan kuwajiban asasi manungsa.”¹⁶⁶

Asbabun Nuzul: -

Ayat diatas menerangkan tentang betapa pentingnya suatu hubungan kemanusiaan. Maka dari itu pemerintah wajib menegakkan hukum kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Hukum ini juga berlaku untuk seluruh umat di dunia.

4. QS. Ar-Ra'd, ayat; 21.¹⁶⁷

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

“Lan wong-wong kang nyambung paseduluran, kang wus kadhawuhake dening Allah kudu kasambung, lan dheweke padha wedi marang Pangerane, lan ala-alane papriksan ana ing dina Qiymat.”

Penafsiran Bakri Syahid: “Saestu nyambut tangsul pasedherekan (silaturahmi) karena Allah, boten pamrih punapa-punapa amung karena sungkem ndherek dhawuhing Allah SWT punika ageng sanget ganjaranipun, sarta kathah sanget manfa'atipun. Mula bukanipun saking anggathukaken balung-balung pisah, ngantos saged kasil anjodohaken sadherek

¹⁶⁶ Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h.188.

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.253.

ingkang ambetahaken saestu jejodohan, wiyaripun damel karukunan gesang bebraying Bangsa saking tuwuhing ikrar (Sumpah Pemuda). Asalipun saking pepanggihan Silaturahmi, lajeng dados ikrar: Satunggal Nusa, Satunggal Basa, lan Satunggal Bangsa, estu-estu punika syarat mutlak badhe kiyating Ketahanan Nasional. Tetilaranipun tiyang sepuh: rukun agawe santosa, crah agawe bubrah.”¹⁶⁸

Asbabun Nuzul: -

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya suatu persatuan dalam sebuah tatanan negara, yang mana persatuan menjadi pangkal dari terbentuknya suatu kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi di negara Indonesia yang merupakan negara dengan beragam suku dan budaya, oleh karena itu persatuan merupakan suatu hubungan silaturahmi yang kokoh serta sebagai pondasi ketahanan nasional.

5. QS. An-Nûr, ayat; 62.¹⁶⁹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا
أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

Penafsiran Bakri Syahid: “Ayat punika Gusti Allah paring dhawuh bab adabipun musyawarah, suraosipun makaten, musyawarah (parlemen) utawi konggres, punapa seminar lan diskusi sapiturutipun, punika kedah wonten ingkang dados pangarsa (pimpinan), utawi sesepuhipun ingkang minangka dados sang nata, ingkang kabiyantu sekretariat lan

¹⁶⁸ Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h.448.

¹⁶⁹ Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, h.360.

administrasi. Sang nata wau kedah saged anjagi tertibipun utawi ruwet rentenging musyawarah. Kados ingkang ambikak lan nutup, sinten-sinten ingkang kaaturan ngestreni, ingkang ngurutaken rembag sarta pangrembagipun kados pundi, ingkang ngidini saha nanata aturing para kanca-anggota musyawarah, tuwin ngendhakaken utawi misah ingkang pepabenan sabab emosi, ingkang ngudhari rembag ingkang ruwet, lan anggolongake ingkang buyar, sarta saged lajeng kaputusaken pisan! Punapa dene sang nata wau kedah saged anggadahi wibawa adil paramarta berbudi bawa laksana, wenang ngidini ingkang pamit badhe medal pasilan (walk out), utawi nyingkiraen anundhung ingkang kamanah badhe damel resah utawi gendraning musyawarah, kadosta sekorsing sasaminipun.....”

Asbabun Nuzul: -

Ayat di atas menerangkan tentang adab dalam bermusyawarah yang harus di ta'ati oleh seluruh peserta dalam musyawarah tersebut. Pada ayat ini Bakri Syahid menerangkan bahwasannya dalam musyawarah harus ada seorang yang memimpin jalannya musyawarah tersebut, guna tercapainya suasana yang yertib dan aman selama pelaksanaan musyawarah hingga mendapatkan hasil untuk kepentingan bersama (mufakat).

6. QS. Hujurât, ayat; 6 dan 7.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ وَأَعْلَمُوا أَن
فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

“ayat 6: He para wong mu'min! Manawa ana wong fasek teka ing sira anggawa pawarta pariwara, sira banjur ngupayaa keterangan benerwe pawarta iku mau, aja nganti sira natoni marang atine sawijining golongan, sabab saka ora ngerti, setemah sira padha getun tumrap tindakira kang sira lakoni. Ayat 7: Sira padha sumurupa! Satemene Rasulullah iku dadi golonganira, saupama dheweke gelem ngrujuki tumrap akeh-akehe prakaranira, yekti malah andadekake kangelanira, ananging Allah wus andokoake iman minangka rerengan ana ing atinira, sarta andokokake rasa gething ana ing atinira yaiku sengit marang panggawe kafir, fasek lan panggawe dosa, wong kang kaya mangkono iku padha oleh pituduh.”

Penafsiran Bakri Syahid: “Intelijen Negara lan Stabilitas Keamanan punika kuwajibanipun Pamarentah kabantu masyarakat. Suraosipun ayat: 6-7 punika manawi ing jaman modern kawastanan BAKIN utawi Badan Koordinasi Intelijen Negara wonten ing Tata Bina Pamarintahan Republik Indonesia. Wonten ing Negari Demokrasi, kados Negari kita, Negari Pancasila, hakekatipun Intelijen Negari lan stabilitas keamanan punika rumagangipun Rakyat ingkang kapimpin dening Pamarentah, lan intinipun kakiyatan ABRI “....¹⁷⁰

Pemaparan ayat di atas menyatakan bahwasannya sangatlah penting sebuah koordinasi dan komunikasi antara para pemerintahan dengan bawahannya dan dengan masyarakat. Jadi seabilitas keamanan dalam suatu negara adalah tanggung jawab masyarakat yang di pimpin oleh pemerintah dan pada itinya terletak di kekuatan ABRI, dari sinilah nampak hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan rakyat serta bagian keamanannya (ABRI). Maka akan tercapai keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

7. QS. An-Nîsâ', ayat; 53

أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا

¹⁷⁰ Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h.1033.

“Utawa apa patut dheweke iku oleh panduman panguwasa? Tangeh lamun; awit upama duwe panguwasa, dheweke ora bakal menhake kabecikn marang liyane.”

Penafsiran Bakri Syahid: *“Tiyang ingkang ngasta panguwos, eksekutif punapa legislatif, nanging boten saged damel kesaenaning sosial lan ekonomi rakyat punika boten pantes.”¹⁷¹*

Asbabun Nuzul: -

Ayat di atas menerangkan bahwasannya seorang penguasa atau pemerintahan dari lembaga eksekutif maupun legislatif tidak lah pantas menempati kedudukannya bila tidak bisa menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bangsa baik itu dari sektor sosial maupun ekonomi masyarakatnya.

8. QS. At-Taubah, ayat; 122

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“ Lan tumrap wong-wong Mu'min ora prayoga kabeh budhal perang, yagene ora ana sing budhal saperangan saka dheweke, perlu padha nyinau 'ilmu mangerteni Agama, lan supaya dheweke banjur awuh pepeling marang kaume manawa wus padha bali menyang kampunge. Muga-muga dheweke (kaum-kaume) padha gelem eling”.

Penafsiran Bakri Syahid: *“Dhawuhing ayat punika kados sampun cetha terang, sarta tetela wonten ing 'alam Islam, bilih kebetahanipun Ummat kedah dipun pilah-pilah lan dipun bage-bage panggarapipun, kados dene Departemen-departemen manawi wonten Pamerintahan. Sadaya gatra (aspek) masyarakat kedah dipun cakup, kados aspek sosial budaya, aspek Ekonomi, aspek Politik, aspek Idiologi, aspek Keamanan-pertahanan, lan aspek Agama. Ngerembakanipun kedah sarwa*

¹⁷¹ Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h.146.

manunggal, integrasi, koordinasi, sinkronisasi, sarta harmonis satunggal lan sawenehipun. Panggarapanipun program, lan wragad sarta ingkang kontrol nitipriksa kedah dipun musyawarahaken dening para ahli lan wakil-wakil rakyat, ingkang mangartosi kabetahaning umat. Dene kabetahaning ummat punika peprincenanipun kathah sanget, boten wonten anggeranipun, jaaran gumantung kaliyan ombak-umbuling kawontenan lan lampahing jaman, sarta kiprahing teknologi modern. Mugi kawuningana ing para sutrisna, bilih ilmu teknologi-modern kalayan Islam boten memengsan, malah sajatosipun sami bantu-binantu, lan sami dene ngisi satunggal ing sawenehipun. Inggih kabetahan ingkang kados makaten punika ingkang kawastanan Fardu Kifayah (kuwajiban ummat ingkang wajib katindakaken kanthi sampurna, manawi dipun lirwakaken ageng sanget bebayanipun lan ageng dosanipun menggahing Allah). Inkang mekaten wau sampun mesthi ugi kemawon sagedipun tumindak samudayanipun, kedah dipun wonteni rerakitaning Organisasi, inggih punika Pamarentah saking pilihaning Ummat ingkang tinata sae, rajin tur beres (clean government). Awit saking punika miturut piwucaling Allah S.W.T. wonten ing Qur'an surat an-Nisa' ayat 59, babagan falsafah dhedasaring Negara (pamarentah), kawilujenganipun Ummat, adeg lan lestantunipun kedah wonten Ulil-amri ingkang saged mranata lan nyakup sadaya gatra (aspek) masyarakating ummat”.

Asbabun Nuzul: -

Ayat di atas menerangkan bagai mana pentingnya peran pemerintahan dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena dengan pemerintahan inilah diharapkan masyarakat dapat bisa mencapai kesejahteraannya dan bisa terlindungi hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai ummat manusia. Sehingga tercapai kesejahteraan dari segala aspek baik itu aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek keamanan dan aspek Agama

Perkembangan suatu bangsa untuk menciptakan masyarakatnya yang adil dan makmur serta pemerintahan yang berjalan harmonis maka

perlu adanya persatuan, integrasi, koordinasi, sinkronisasi, serta harmonisasi antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk mengontrol serta untuk memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat maka perlu dimusyawarahkan oleh para ahli dan wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat (pemerintah) haruslah bersikap baik, jujur dan bersih. Allah pun telah menyatakan dalam QS. An-Nisa' ayat 59 bahwasannya falsafah dasar suatu Negara agar untuk keselamatan ummat dan untuk kesejahteraan di dunia dan di akhirat maka perlu adanya Ulil-amri (pemerintah) yang bisa menata dan melindungi masyarakatnya dari segala aspek.

Ulasan ayat-ayat di atas secara garis besar menjelaskan bahwa penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerintahan sangatlah dipengaruhi oleh latar belakang dan profesi yang dimilikinya pada saat itu. Kemudian dalam menafsirkan ayat ia juga menghubungkan dengan keadaan sosial kemasyarakatannya dan keadaan budaya yang melatarbelakangi penafsiran Bakri Syahid serta terdapat pula munasabah ayat yang ia lakukan seperti ketika ia menafsirkan QS. At-Taubah, ayat; 122 yang ia kaitkan dengan penafsirannya dengan QS. An-Nisa' ayat 59 seperti yang telah penulis paparkan di atas.

C. Konsep Pemerintahan Bakri Syahid

Mengingat penelitian ini menggunakan teori dari Amin al-Khuli, setelah di sub bab sebelumnya penulis mengumpulkan ayat, membahas penafsiran Bakri Syahid yang disertai Asbabun Nuzul dan keterangan-keterangannya maka di sub bab ini penulis berusaha mengungkapkan bagaimana konsep pemerintahan menurut Bakri Syahid. Setelah penulis melihat pada ayat-ayat yang sudah penulis kumpulkan dan dengan melihat latar belakang dari penulisan tafsir *al-Huda* dari segi sosial kemasyarakatan dan budaya, serta melihat latar belakang dari penafsir. Maka tampak jelas bahwasanya dalam tafsir *al-Huda*, konsep pemerintahan Bakri syahid secara garis besar adalah pemerintahan yang bersistem Demokrasi Pancasila, yang mana berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. Konsep-konsep pemerintahan Bakri Syahid dalam tafsir *al-Huda* adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan, konsep dimana pemerintahan berlandaskan akan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan Pancasila sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu para pemerintah wajib beriman kepada Allah, hal ini sesuai dalam penafsiran Bakri Syahid terhadap QS. An-Nisâ’ (4) ayat; 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“He para wong mu'min sira padha angestokna marang Allah, lan angestokna marang Rasul, sarta angestokna wong kang ngasta Pamerintahan saka sira kabh. Dene manawa sira padha

pasulayan ana ing sawijining perkara, supaya sira padha ambalekake perkara iku marang Allah, (al-Qur'an) lan Rasul (Sunnahe) yen nyata sira iku padha iman ing Allah lan dina Akhir, kang mangkoo iku luwih becik sarta luwih prayoga akibat-kadadeane."

Penafsiran: *"Tiyang ngasta Pemerintahan punika wajib iman ing Allah, iman dhumateng Rasulullah s.a.w, sarta nindakaken sadaya tatanan lan aturan agami Islam, manawi boten, tanghe lamun badhe sged damel adil-makmur materiil lan spirituil, karaharjan Donya lan Akherat.i"*¹⁷²

Mengingat bahwasannya manusia adalah makhluk ciptaan Allah di bumi ini, begitu juga halnya para pemegang pemerintahan. Maka sebagai makhluk ciptaan Allah wajiblah ber iman kepada-Nya, demi tercapainya kesejahteraan di Dunia maupun di Akhirat.

2. Kemanusiaan, konsep dimana pemerintah harus mempunyai sikap berperikemanusiaan. Sesuai dengan Pancasila sila ke-2 "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Hal ini sesuai dengan penafsiran Bakri Syahid terhadap QS. Al-Mâidah (5) ayat; 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

¹⁷² Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 147.

“Jalaran saka iku, Ingsun anetepake sawijining hukum tumrap Bani Israil, satemene sing sapa wonge mateni wong, kang mangka kang dipateni iku ora mateni sawijining wong, utawa ora sebab gawe rusak ing Bumi, mangka kaya-kaya dheweke iku mateni wong sajadad; lan sing sapa wonge nguripi sawijining wong, mangka kaya-kaya dheweke iku nguripi wong sajadad. Lan yekti wus rawuh marang wong-wong mau para Utusan Ingsun kang ngampil pirang-pirang ayat tandha yekti kang padha nelahi, tumuli sawuse pepadhang iku akeh-akehe wong mau padha tumindak angliwati wates ana ing Bumi.”

Penafsiran: *“Artosipun tiyang punika anggota masyarakat, dados sintea mejahi tiyang, sami kaliyan mejahi katurunanipun. Pramila hukum ingkang katetepaken tumrap Bani Israil kasebat, punika tegese hukum interasional ugi (kangge manungsa sa Donya!), lan salah satunggaling hak asasi lan kuwajiban asasi manungsa.”¹⁷³*

Ayat diatas menerangkan tentang larangan adanya kekerasan dan saling membunuh, sesuai dengan apa yang sudah di paparkan pada ayat di atas bahwasanya jika membunuh satu orang saja yang mana orang itu tidak membunuh orang lain dan tidak melakukan kesalahan di mukabumi maka sama saja dia membunuh manusia seluruhnya, begitu pula sebaliknya.

Ayat diatas juga menerangkan tentang betapa pentingnya suatu sikap kemanusiaan, dimana manusia yang satu dengan yang lain harus saling tolong-menolong dan saling membutuhkan hal ini sesuai dengan sebutan manusia sebagai makhluk sosial. Maka dari itu pemerintah wajib menegakkan hukum kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Hukum ini juga berlaku untuk seluruh umat di dunia. Di sinilah peran pemerintahan sangat penting yaitu sebagai sistem yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

¹⁷³ Bakri Syahid, *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 188.

3. Persatuan, konsep dimana pemerintah harus menjadi pemersatu bangsa Indonesia, yang di tuangkan dalam Sumpah Pemuda dan pada Pancasila, sila ke- 3 “persatuan Indonesia”, karena hal inilah yang menjadi kekuatan Ketahanan Nasional. Hal ini sesuai dengan penafsiran Bakri Syahid terhadap QS. Ar-Râ’d (13) ayat; 21:¹⁷⁴

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

“Lan wong-wong kang nyambung paseduluran, kang wus kadhawuhake dening Allah kudu kasambung, lan dheweke padha wedi marang Pangerane, lan ala-alane papriksan ana ing dina Qiyamat.”

Penafsiran: *“Saestu nyambut tangsul pasedherekan (silaturahmi) karena Allah, boten pamrih punapa-punapa amung karana sungkem ndherek dhawuhing Allah SWT punika ageng sanget ganjaranipun, sarta kathah sanget manfa’atipun. Mula bukanipun saking anggathukaken balung-balung pisah, ngantos saged kasil anjodohaken sadherek ingkang ambetahaken saestu jejodohan, wiyaripun damel karukunan gesang bebraying Bangsa saking tuwuhing ikrar (Sumpah Pemuda). Asalipun saking pepanggihan Silaturahmi, lajeng dados ikrar: Satunggal Nusa, Satunggal Basa, lan Satunggal Bangsa, estu-estu punika syarat mutlak badhe kiyating Ketahanan Nasional. Tetilaranipun tiyang sepuh: rukun agawe santosa, crah agawe bubrah.”*

Pada penafsiran ayat di atas terlihat bahwasannya untuk mencapai suatu negara yang bersatu, adil dan makmur perlu adanya persatuan di dalamnya yang di wujudkan dengan adanya Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa yang tertuang dalam “Sumpah Pemuda”. Dengan semboyan bangsa Indonesia “Bienika Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tetap satu jua, ini

¹⁷⁴ Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, h. 253.

berarti walaupun negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya tetapi dengan adanya persatuan kita tetap satu yaitu Indonesia.

4. Musyawarah, konsep dimana pemerintahan wajib menentukan sebuah kesepakatan atau memutuskan suatu hal dengan jalan musyawarah yang mana dalam musyawarah tersebut melibatkan masyarakat atau perwakilannya hingga tercapailah suatu kesepakatan bersama (mufakat). Hal ini tertuang dalam Pancasila, sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sesuai dengan penafsiran Bakri Syahid terhadap QS. Asy-syûra, ayat; 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Lan tumrap wong-wong kang padha ngestokaken dhawuhing Allah Pangerane! Lan padha nyampurnakke Shalat, sarta padha gelem rerembungan sakancane tumrap prakara kaperluane! Apa dene padha gelem nanjakake rezeqi kang wus Ingsun paringake.”

Penafsiran: “Saking tembung “wa amruhum syuura bainahum” ingkang artosipun:”ana ing prakatera kaperluane wong-wong mau padha gelem rerembungan”. Rerembungan perkawis ingkang nglimputi kabetahaning ngakathah punika sampun kalimrah naminipun: musyawarah, muktamar, seminar, simposium, lokakarya, diskusi, saresehan, rembug desa, parlemen, DPR, lan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lan sanes-sanesipun. Tehnis lan tata-cara sarta adi-cara rerembagan punika saged dipun atur miturut kaperluanipun. Makaten ugi kados rerembagan politik, ekonomi, kebudayaan, perang utawi dhame ing PBB- New York, amerika Serikat, punika pokokipun amrih damel sae lan manfaat ing sadaya anggotanipun, dene kadhangkala dedrek, adreng, sami kiyatipun utawi kapeksa lan panci sengaja veto, punika limrah! Jer manungsa pados menang punika sami-sami kita mangartosi. Dene manawi wonten ingkang jagungan pendhirian pados kaleresan punika nami lampah utami, inggih

intisari PBB ingkang ideal! Sanaosa kadospundi, tiyang sampun purun rerembagan punika paribasanipun, boten badhe kaduwung ing tembe wingkingipun. Dhawuhing Hadist: “Laa khoba manistasyar, walaa nadima manis tkhor”, ora rugi wong kng rembugan, lan ora getun wong kang duwe pamilih”. Inggih punika bukti manawi manungsa titah (makhluk) sosial, lan bukti ugi manawi doktrin Al-Qur’an punika kasunyatan ing leres lan dados rahmat sadaya Bangsa ing alam Jagad Raya.

Musyawarah merupakan pangkal dari pemikiran untuk kemajuan bangsa, dimana dalam musyawarah ini lah tercapainya suatu keputusan-keputusan yang di gagas oleh pemerintah disertai masyarakat ataupun perwakilannya. Dan barang siapa yang melaksanakan musyawarah tidak akan mungkin menyesal di akhirnya, karena dengan musyawarah semua permasalahan dapat diselesaikan secara bijak, demi tujuan kemaslahatan bersama.

5. Keadilan, konsep dimana seorang pemerintah haruslah ber sikap adil dalam menjalankan amanat yang merek emban. Hal ini tertuang dalam Pancasila, sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang mana sesuai dengan penafsiran Bakri Syahid terhadap QS. An-Nîsâ’, ayat; 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sanyata Allah dhawuh marang sira kabeh supaya sira padha amasrahake titipan marag kang andarbeni, lan manawa sira padha mutusi ana ing antaraning para manungsa, supaya sira mutusi sarana adil. Sanyata becik-beciking pitutur iku kang diparingake dening Allah marang sira kabeh, sanyata Allah iku kang Midhanget sarta kang Mriksani.”

Penafsiran: *“Negarawan utawi sinten kemawon ngasta
Pemerintahan wajib asifat jujur sarta adil ing sadaya aspek
sosial, manawi mboten, tamtu kakisruhan ingkang badhe
kadadosan!”*

Pemerintah bertugas mengayomi seluruh rakyatnya, maka dari itu pemerintah wajiblah berlaku adil dalam segala aspek kehidupan baik itu sosial maupun ekonomi, demi tercapainya kemakmuran seluruh masyarakat yang di pimpinnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan panjang lebar pembahasan di atas, maka disini penulis menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat pemerintahan sangatlah dipengaruhi oleh keadaan keilmuan dan profesinya sebagai anggota militer, latar belakang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan Jawa yang mana sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya keilmuan Bakri Syahid pun juga sangat berpengaruh terhadap penafsiran Bakri syahid.
2. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tafsir *al-Huda* dan melihat pula latar belakang mufasirnya maka secara garis besar konsep pemerintahan Bakri Syahid dalam Tafsir *Al-Huda* dibagi menjadi lima bagian,yaitu:
 6. Ketuhanan, konsep ini berlandaskan pada QS. An-Nîsâ', ayat; 59. yang menyatakan pemerintah wajib beriman kepada Allah.
 7. Kemanusiaan, konsep ini berlandaskan pada QS. Al-Mâidah (5) ayat; 32, dimana pemerintah harus mempunyai sikap berperilaku kemanusiaan.
 8. Persatuan, konsep ini berlandaskan pada QS. Ar-Râ'd (13) ayat; 21, dimana pemerintah harus menjadi pemersatu bangsa Indonesia.

9. Musyawarah, konsep ini berlandaskan pada QS. Asy-syûra, ayat; 38, dimana pemerintah harus mencari pertimbangan untuk menentukan suatu keputusan yang mana musyawarah tersebut harus melibatkan masyarakat atau perwakilannya.
10. Keadilan, konsep ini berlandaskan pada QS. An-Nîsâ', ayat; 58, dimana pemerintah haruslah bersikap adil dalam menjalankan semua amanat yang diembannya. Demi kemakmuran masyarakat serta demi tercapainya kesejahteraan dunia, akhirat, kesejahteraan material maupun sepiritual.

Secara garis besar pemerintahan yang digagas oleh Bakri Syahid dalam tafsir *al-Huda* adalah pemerintahan yang selaras dengan Pancasila. Maka dari itu pemerintahan Bakri Syahid dapat dikatakan pemerintahan yang bersistem Demokrasi Pancasila di mana Pancasila dan UUD 19945 merupakan landasan dari Negara kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran dari penulis kepada seluruh pembaca skripsi ini, baik dari kalangan mahasiswa IAIN Surakarta maupun kalangan di luar lingkup kampus, diantaranya adalah;

1. Sebagai kajian keilmuan, konsep pemerintahan dalam arti global telah banyak dibahas. Sementara dalam konteks ke-Indonesiaan kajian mengenai konsep pemerintahan berdasarkan pemikiran beberapa tokoh Islam terutama dalam tafsir al-Qur'an masih perlu untuk dikaji lebih banyak lagi, mengingat tidak sedikit pula para Mufasirin Indonesia serta

para penduduk Indonesia yang mayoritas Islam yang berada di berbagai macam daerah.

2. Kegelisahan intelektual dan ketidak puasan akan ilmu merupakan suatu keadaan yang wajar bagi para akademisi, hal ini sebagai bukti peduli terhadap kemajuan akan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Karenanya penelitian mengenai konsep pemerintahan menurut Bakri Syahid yang penulis lakukan ini akan lebih baik lagi jika di kembangkan dengan metode-metode lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Amîn al-khûlî. *Manâhij Tajdîd: fî al-nahwi wa al-Balâghah wa al-Adab*. Kairo: Dâr al-Ma'arif, 1961.
- A. Ubaidillah, *Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Asep Usman Ismail. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 1998.
- _____. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.11, 1998.
- _____. *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'n atas Masalah Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Departemen Agama RI, Lajnah Pentafsir Al-Qur'an. *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sukses Publishing, 2012.
- Gusmian, Islah. *Tafsir al-Qur'an Bahasa Jawa, Peneguhan Identitas, Ideologi dan Politik*, <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>, diakses pada 25, November, 2016.
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Bekasi: Darul Falah, cet. IV, 2012.
- Inu Kencana Syafi'ie. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pradigma, 2010.
- Maszofi. *Konsep Pemimpin Islam dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-'Uyun Karya Abu Hasan Bin 'Ali bin Muhammad Al-Mawardi*. Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014.
- Miftahudin Dwi Saputra. "Konsep Pemerintahan Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah". Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Surakarta, 2015.

- Muhammad al-Mubarak. *Sistim Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*. Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mahmudah, Nur. *Menelisik Visi Politik Al-Qur'an*. Jurnal Hermeneutik, Vol. 8, Nomor 1, 2012.
- Muhsin, Imam. *Al-Qur'an dan Budaya Jawa*. Yogyakarta: ELSAQ Press, 2013.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. III, 1995.
- Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada Unuversiuty Press, 2001.
- Rahardjo, Basuki. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Persepektif Kependudukan*. Yogyakarta:Gerbang Media, 2015.
- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umt*. Bandung: Mizan, 2003.
- _____. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, jld. II, 2007.
- Sitepu, P. Anthonius. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syahid, Bakri. *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*. Yogyakarta: Bagus Arafah, cet. 3, 1983.
- Wardoyo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ushuluddin STAIN Surakarta*. cet-I. Kartasura: Penerbit Sopia, 2008.
- Wawancara pribadi dengan Sunarti, melalui telepon, Surakarta, 21 Februari 2017.
- Winarno, *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Kedua, Cet. 8, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khusnul Arifah Ma'sum

Nim : 121112005

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Tempat/tgl. Lahir : Karanganyar, 05 Maret 1992

Alamat : Dsn. Tegan, Rt:02/Rw:03, Dsa. Kadipiro, Kec.
Jumapolo, Kab. Karanganyar

Nama Ayah : Paiman

Nama Ibu : Sukini

Pendidikan :

1. SDN 01 Kadipiro
2. MTs N Jumapolo
3. Pondok Modern Darusalam Gontor Putri 1,
Mantingan, Ngawi
4. IAIN Surakarta

Pengalaman Organisasi :

1. Racana Raden Mas Said-Nyi Ageng Serang
IAIN Surakarta.
2. Karangtaruna Bima Gatra, Dsn. Tegan.